



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Surat kabar Kompas dan Republika secara umum telah melakukan dan menerapkan prinsip objektivitas dengan baik. Dari 6 kategori yang diteliti, masing-masing surat kabar telah menunjukkan bentuk kepatuhannya pada prinsip objektivitas, yaitu meliputi fakta yang diangkat, kelengkapan 5W dan 1H, relevansi pemberitaan, tipe liputan, dan netralitas pemberitaan. Dari seluruh kategori yang diteliti, hal yang masih membutuhkan perhatian serius adalah sifat fakta yang diangkat dalam pemberitaan. Fakta psikologis yang banyak diangkat dalam berita membuat pemberitaan menjadi tidak objektif. Fakta psikologis muncul ketika wartawan tidak memberikan fakta nyata yang diperolehnya dari pengamatan di lapangan, melainkan memberikan fakta yang berupa interpretasi subjektif (pernyataan/opini) terhadap fakta/gagasan. Pemuatan pernyataan/opini membuat berita menjadi tidak objektif karena merupakan interpretasi subjektif narasumber, dan bukan merupakan hasil pengamatan wartawan atas kejadian faktual di lapangan. Kedua media, baik Kompas maupun Republika, terlalu banyak memasukkan opini, pernyataan, dan pendapat para tokoh elit dalam pemberitaan, sehingga berita menjadi tidak faktual, karena fakta yang disusun berdasarkan pendapat para tokoh. Kesan yang muncul adalah bahwa kemudian media menjadi ajang silat lidah para tokoh politik atau pejabat yang terlibat. Untuk menghindari pemuatan kutipan yang bermuatan opini, sebaiknya wartawan

melengkapi informasi tentang fakta yang berkaitan dengan unsur *why* dan *how*, yaitu mengenai latar belakang terjadinya peristiwa dan bagaimana proses terjadinya peristiwa. Dengan kelengkapan unsur *why* dan *how*, pemberitaan akan penuh dengan informasi yang faktual. Dilihat dari sisi kelengkapan berita atau *completeness*, Kompas dan Republika sudah menjalankan prinsip *compeleteness* dengan baik, ditandai dengan nilai kelengkapan 5W dan 1H yang tinggi.

Prinsip mengenai relevansi berita juga telah dijalankan oleh Kompas dan Republika dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai berita yang banyak dijumpai dalam pemberitaan adalah nilai berita yang mengarah ke *significance*. Pemberitaan yang mengarah ke *significance* mempunyai nilai yang penting dan layak untuk diketahui orang banyak. Maka semakin penting dan layak sebuah berita untuk diketahui orang banyak, semakin relevan berita tersebut. Dilihat dari dimensi pemberitaan, Kompas dan Republika telah memberikan berita yang relevan, ditandai dengan banyaknya pemberitaan yang berdimensi mengarah ke politik dan pemerintahan. Dengan menempatkan berita Resolusi Iran ke dalam dimensi politik dan pemerintahan, maka pemberitaan semakin relevan dengan masalah yang diberitakan.

Kompas dan Republika juga telah melakukan liputan sesuai dengan standar *balance*, ditandai dengan tipe liputan yang banyak dipakai adalah tipe liputan dua sisi. Sedangkan prinsip *neutral presentation* belum dijalankan dengan baik khususnya oleh Kompas, karena hampir separuh dari pemberitaan cenderung memihak kepada mereka yang menolak Resolusi. Sedangkan Republika sudah menjalankan prinsip *neutral presentation* dengan baik yaitu dengan memberikan

pemberitaan yang kombinasi, artinya tidak hanya memihak yang menolak atau mendukung atau sebaliknya, namun *Republika* menghimpun mereka yang menolak maupun mendukung dalam satu pemberitaan sekaligus. Dengan cara ini *Republika* telah memberikan pemberitaan yang netral, tanpa memihak salah satu pihak. Untuk lebih jelasnya mengenai poin-poin yang diteliti dalam penelitian ini, berikut penjelasannya :

1. *Kompas* dan *Republika* cenderung menampilkan fakta psikologis daripada fakta sosiologis. Jenis fakta yang banyak diangkat dalam 23 berita seputar kontroversi Resolusi DK PBB atas Iran adalah fakta psikologis, yaitu sebesar 81,8% di *Kompas* dan 58,3% di *Republika*.
2. Kelengkapan 5W & 1H di masing-masing surat kabar, baik *Kompas* maupun *Republika*, sudah baik, ditunjukkan dengan lengkapnya unsur *what*, *who*, *where*, dan *when*, masing-masing sebesar 100%. Ketidaklengkapan dijumpai pada unsur *why* dan *how*.
3. Nilai berita yang diangkat *Kompas* dan *Republika* dalam pemberitaan tentang kontroversi Resolusi DK PBB adalah mengarah ke *significance*. Keseluruhan berita yang diteliti, yaitu sebanyak 23 item, terdiri dari 11 item berita *Kompas* dan 12 item berita *Republika*, memiliki nilai berita yang mengarah ke *significance*. Nilai berita yang ditemukan adalah *timeliness* dan *proximity*. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan tentang kontroversi Resolusi PBB atas Iran memiliki tingkat relevansi yang tinggi, karena peristiwa tersebut penting dan layak untuk diketahui masyarakat

4. *Kompas* dan *Republika* memasukkan pemberitaan tentang kontroversi Resolusi PBB untuk Iran pada dimensi yang mengarah ke politik dan pemerintahan. Diketahui dari hasil penelitian, 90,9% berita di *Kompas* berdimensi mengarah ke politik dan pemerintahan dan sisanya 9,1% berdimensi mengarah ke agama. Sedangkan di *Republika*, sebesar 91,7% dari seluruh berita berdimensi mengarah ke politik dan pemerintahan, dan hanya 8,3% yang berdimensi mengarah ke agama.
5. *Kompas* dan *Republika* lebih banyak menggunakan tipe liputan dua sisi. Tipe liputan dua sisi menempati posisi teratas, yaitu sebanyak 45,4% di *Kompas*, dan 41,7% di *Republika*, disusul dengan tipe liputan satu sisi, kemudian tipe liputan multi sisi.
6. Tema pemberitaan kontroversi Resolusi DK PBB untuk Iran di *Kompas* cenderung menolak Resolusi, yaitu sebesar 45,5% dari seluruh pemberitaan. Sedangkan *Republika* menampilkan tema kombinasi, yaitu menyajikan tema penolakan maupun dukungan dalam satu berita sekaligus, sebesar 50% dari keseluruhan pemberitaan

B. Saran

Penelitian ini hanya meneliti objektivitas berita di tingkat teks. Hasil yang didapatkan sebagaimana dirumuskan dalam perumusan masalah telah tercapai, namun data yang diperoleh dari teks-teks berita yang ada masih kurang memadai untuk membahas sikap objektif yang dilakukan media dalam peristiwa kontroversi resolusi Iran. Kekurangan peneliti pada penelitian ini adalah peneliti tidak

melakukan wawancara dengan media yang digunakan sebagai objek penelitian, yaitu Kompas dan Republika, sehingga hal-hal seperti perbedaan sikap antara Kompas dan Republika dalam masalah resolusi Iran, atau perbedaan fakta yang cukup signifikan yang ditampilkan kedua media tersebut menjadi hal yang tidak dapat digali lebih dalam. Saran peneliti untuk penelitian yang akan datang dengan tema atau metode yang sama, sebaiknya penelitian dilakukan dengan melibatkan penelitian di tingkat teks dan konteks. Penelitian di tingkat konteks dapat dilakukan dengan wawancara pada media yang dijadikan objek penelitian agar penelitian menjadi lebih mendalam, terutama agar hasil penelitian dapat dibahas secara mendetail dengan merujuk pada data yang ada. Wawancara dapat menjadi pelengkap data yang tidak dapat ditemukan dalam teks berita, yang pada akhirnya dapat membantu peneliti untuk mengetahui lebih dalam mengenai keputusan media dalam menyikapi suatu peristiwa yang dapat berpengaruh pada objektivitas berita.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Birowo, Antonius, (ed.). 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Gitanyali.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS. 2002
- Fiske, John. 1990. *Introduction to Communication Studies: Second Edition*. New York: Routledge
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Hasrulah. 2001. *Megawati dalam Tangkapan Pers*. Yogyakarta: LkiS.
- Hill, David T. 1995. *The Press in New Order Indonesia*. Jakarta: PT.Pusaka Sinar Harapan
- Krippendorff, Klauss. 1993. *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi (Terjemahan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- McQuail, Denis. 1992. *Media Performance: Mass Communication and The Public Interest*. London: Sage Publications Ltd.

- McQuail, Denis. 1991. *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Muda, Deddy Iskandar. 2003. *Jurnalistik Televisi: Menjadi Reporter Profesional*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya
- Nugraha, Bimo. 1999. *Politik Media Mengemas Berita*. Jakarta: ISAI
- Rahayu. 2006. *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Media dan Budaya Populer, Dewan Pers, dan Departemen Komunikasi dan Informasi.
- Rivers, William L dan Cleve Mathews. 1994. *Etika Media Massa dan Kecenderungan untuk Melanggarnya*. Jakarta: Gramedia.
- Sadono, Bambang SY. 1996. *Profil Pers Indonesia: 50 Tahun PWI Mengabdikan Negeri*. Semarang: Penerbit Citra Almamater.
- Siregar, Ashadi. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Sobur, Alex. 2002. *Analisis Isi Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Sularto, St, (ed.). 2001. *Humanisme dan Kebebasan Pers: Menyambut 70 Tahun Jakob Oetama*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Wimmer, Roger D. dan Joseph R. Dominick. 2003. *Mass Media Research an Introduction: Seventh Edition*. Wadsworth: Thomson Learning, Inc.

Artikel/berita dari Surat Kabar

Kompas. *Republika Tidak Akan Menjadi Corong ICMI*. 3 Januari 1993.

Kompas. *Resolusi Baru DK Soal Iran Dibahas; RI Usulkan Perubahan, Rusia Tolak Sanksi Eksekutif*. Kamis 22 Maret 2007. Hal.9

Kompas. *Iran Pasca-Resolusi DK PBB*. Selasa 3 April 2007. Hal 6

Skripsi

Nugraha, Punjul Setya. 2003. *Bias Berita Surat Kabar: Analisis Isi Mengenai Bias Berita Utama Politik di Surat Kabar Harian Republika Selama Tahun 1999*.

Jurusan Ilmu Komunikasi. UGM. Skripsi.

Internet

www.republika.co.id

www.kompas.co.id/infokarir/kkg/index.cfm



LAMPIRAN 1

**BERITA KONTROVERSI RESOLUSI IRAN DI
SURAT KABAR HARIAN KOMPAS**

Sanksi Keras Bisa Lahirkan Masalah

Pemungutan Suara soal Iran Segera Berlangsung

JAKARTA, KOMPAS — Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, sanksi yang keras dan luas terhadap Pemerintah Iran dapat menimbulkan masalah baru. Oleh sebab itu, Pemerintah RI berharap Dewan Keamanan PBB mendengar lebih dahulu pendapat anggota tidak tetap DK sebelum memutuskan resolusi terhadap Iran.

Demikian disampaikan Presiden Yudhoyono sesuai menghadiri acara Hari Meteorologi Dunia Ke-57 dan Penyerahan Penghargaan Badan Meteorologi dan Geofisika di Istana Negara, Jakarta, Jumat (23/3).

Terkait dengan rancangan resolusi terhadap Iran yang kini tengah disiapkan lima negara anggota tetap DK PBB, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, China, dan Rusia, Presiden Yudhoyono, Kamis malam, mengatakan telah menelepon Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki dan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad.

Dalam komunikasi telepon itu, Presiden Yudhoyono membicarakan rencana resolusi DK PBB jika Iran tetap memaksa melakukan pengayaan nuklir.

"Kami berpendapat, sebaiknya Iran dan lima negara anggota tetap DK PBB menggunakan celah-celah, peluang yang ada, meski seberapa pun kecilnya, untuk mencapai solusi terbaik, tanpa harus ada penjatihan sanksi-sanksi yang keras dan luas, yang bisa menimbulkan masalah baru," ujar Presiden.

Menurut Presiden, Afsel, seperti halnya Indonesia, memiliki peranan yang penting dan mempunyai posisi hampir sama.

Presiden Yudhoyono mengatakan, "Anggota tetap dan tidak tetap DK PBB sebaiknya diberi peluang untuk memberikan pandangannya sehingga resolusi apa pun yang dikeluarkan nantinya tidak sepihak karena sudah mewadahi seluruh pandangan semua anggota DK PBB."

Dikatakan Presiden, sekalipun rancangan resolusi akhirnya

“

Usulan RI dan Qatar untuk memasukkan kawasan Timur Tengah bebas nuklir juga ditolak AS karena dianggap ditujukan kepada Israel.

menjadi resolusi, diharapkan resolusi yang dibuat adalah resolusi yang tepat dan tidak keluar dari konteks, serta bisa menjadi solusi. "Syukur-syukur jika tidak perlu ada resolusi baru karena telah didapat jalan tengah terbaik," ujar Presiden.

Kurangi ketegangan

Menyangkut pembicaraannya dengan Presiden Iran, Presiden Yudhoyono mengatakan, sekecil apa pun peluang yang ada, diharapkan ada satu kompromi atau jalan tengah yang bisa menyelesaikan masalah nuklir Iran secara menyeluruh.

"Saya sampaikan kepada Presiden Iran untuk mengurangi ketegangan dengan cara bekerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional PBB (IAEA) dan bernegosiasi dengan pihak lainnya. Harapan kita, masalah nuklir Iran bisa diselesaikan secara damai," demikian Presiden.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi berpendapat, sebagai anggota tidak tetap DK, RI harus membela kepentingan bangsa Iran yang kini menghadapi sanksi DK atas pengem-

banan teknologi nuklir yang dilakukannya.

"Jika bangsa-bangsa lain dapat mengembangkan teknologi nuklir, Iran juga memiliki hak yang sama. Namun, yang terjadi saat ini adalah ketidakpercayaan negara-negara besar atas kemampuan Iran," ujarnya.

Oleh karena itu, dalam menghadapi penghitungan suara di sidang DK PBB, Hasyim berharap Pemerintah RI berani menolak usulan resolusi itu. "Menolak merupakan sikap terbaik bagi Indonesia, tetapi kalau mau mengambil jalan tengah, pilihan abstain dapat digunakan," kata Hasyim.

Negara-negara anggota DK, Jumat, akan kembali mempelajari draf resolusi yang sudah diperbaiki, dengan harapan bisa segera dilakukan pemungutan suara pada Sabtu ini.

Negara-negara adikuasa di DK menyebutkan draf itu sebagai naskah akhir, tetapi Duta Besar Inggris untuk PBB Emyr Jones Perry mengatakan perubahan masih mungkin dilakukan sebelum pemungutan suara.

Draf akhir yang diajukan lima anggota tetap DK hampir menolak seluruh usulan amandemen dari Afsel, yang praktis akan mengubah sebagian besar pasal mengenai larangan penjualan senjata dan pembatasan keuangan.

"Mereka mengatakan kepada kami bahwa kita akan bernegosiasi dengan memberi dan menerima. Mereka melakukan persis apa yang mereka tidak seharusnya lakukan," ungkap Duta Besar Afsel untuk PBB Dumisani Kumalo, yang menjabat Presiden DK PBB.

Usulan RI dan Qatar untuk memasukkan kawasan Timur Tengah bebas nuklir juga ditolak AS karena dianggap ditujukan kepada Israel. Akan tetapi, beberapa diplomat berusaha menekan AS untuk menerima usulan itu, untuk mendapatkan dukungan dari Qatar dan Indonesia yang sama-sama berpenduduk mayoritas Islam. (AP/REUTERS/HAR/MZW/OKI)

KOMPAS, SELASA, 27 MARET 2007

Usulan Perubahan RI Diterima

Kalangan Dalam Negeri Protes Keras terhadap Sikap Pemerintah soal Nuklir Iran

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan Indonesia untuk mendukung draf resolusi sehingga menjadi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 adalah untuk semakin mendorong solusi damai atas masalah nuklir Iran. Seruan-seruan dalam resolusi itu konsisten dengan posisi Indonesia selama ini dalam masalah Iran.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda saat memberikan penjelasan langsung kepada wartawan didampingi Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan Dino Patti Dja-

lal dan Jubir Departemen Luar Negeri Kristiarto Legowo, Senin (26/3), di Deplu, Jakarta.

Menlu menjelaskan, resolusi itu harus dilihat keutuhannya sebagai kelanjutan dari Resolusi DK

No 1737 yang tidak dilaksanakan Iran, yaitu resolusi yang meminta Iran menghentikan aktivitas pengayaan uraniumnya.

"Kita juga mencoba menampung aspirasi Iran agar proses perundingan dilakukan dengan itikad baik. Dan seperti diharapkan negara-negara Arab, masalah nuklir Iran harus dilihat dalam keutuhan konteks kawasan, yaitu keperluan menciptakan kawasan bebas nuklir di Timur Tengah," ujarnya.

**Baca Juga
soal
Nuklir Iran**

Iran Takkan
Lupakan
Pendukung
Resolusi

HAL 8

Oleh karena empat usulan perubahan draf resolusi RI lalu diterima dan dimuat dalam Resolusi 1747, RI memutuskan mendukung resolusi itu.

Empat usulan perubahan itu adalah rujukan tentang Timur Tengah sebagai kawasan yang bebas senjata pemusnah massal, termasuk nuklir. Penguatan kembali bahwa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian larangan penyebaran senjata nuklir (Traktat Nonproliferasi

Nuklir/NPT) juga mengikat semua. Ada jaminan pengembangan nuklir untuk tujuan damai, termasuk hak Iran. Perundingan penyelesaian masalah nuklir Iran hendaknya dilandasi itikad baik.

"Jangan karena resolusi itu ditujukan kepada Iran, sepertinya Indonesia mengubah posisi. Yang harus dicermati adalah bagaimana resolusi ini mengutamakan solusi damai dan sanksi yang bersifat persuasif agar Iran bersungguh-sungguh menempuh solusi

(Bersambung ke hal 15 kol 3-4)

Usulan Perubahan RI Diterima

(Sambungan dari halaman 1)

damai. Jangan melihat Indonesia kemudian dikontraskan dengan Iran. Qatar yang negara Arab pun mengambil posisi seperti kita. Jangan lupa, pilihan kebijakan kita adalah penyelesaian isu nuklir Iran secara damai, bukan solusi militer. Kita sudah mengatakan kepada Iran, Indonesia akan menentang siapa pun yang memblokir pengembangan energi nuklir dari tujuan damai ke tujuan militer," papar Menlu.

Dengan kawasan Timur Tengah yang bebas nuklir, lanjut Menlu, RI tak berbicara mengenai negara tertentu. Namun, jika sampai menit terakhir ada keberatan dari negara anggota DK (Amerika Serikat) mengenai klausul ini, dapat diartikan pihak tertentu menafsirkan sebagai Israel.

"Memang pada kenyataannya walaupun tak pernah diakui, Israel sudah mempunyai senjata nuklir. Karena itu, masuknya ketentuan ini sangat disambut baik negara-negara Arab," katanya.

Reaksi domestik

Di dalam negeri, keputusan RI mendukung resolusi yang memuat sanksi tambahan kepada Iran itu memperoleh reaksi keras dari berbagai pihak.

Kalangan DPR menilai Pemerintah RI mengkhianati persahabatan dengan Iran dengan turut menyetujui Resolusi 1747 itu. Sejumlah anggota DPR dari Komisi I pun akan menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan kebijakan tersebut.

"Sikap pemerintah ini berpotensi untuk pemakzulan presiden

dan wakil presiden. Tetapi, sebelum itu kita akan mengajukan hak interpelasi," ucap anggota Komisi I dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Effendy Choirie.

Ketua DPR Agung Laksono turut menyayangkan sikap pemerintah itu, sedangkan anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, mengatakan, sebagai anggota DK PBB yang merepresentasikan negara Islam terbesar dunia, RI seharusnya mendukung sikap Iran atas program nuklir untuk kepentingan sipil.

"Solidaritas Indonesia terhadap dunia Islam diragukan. Pemerintah telah mengabaikan aspirasi umat Islam Indonesia yang menentang tuduhan Barat terhadap Iran. Pemerintah RI seolah-olah berada dalam pengaruh dan tekanan AS," kata Yuddy.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga protes keras. "Peranan Indonesia sebenarnya sangat diharapkan. Negara-negara Islam dan anggota Gerakan Nonblok banyak yang ingin menjadikan Indonesia sebagai rujukan dalam menentang ketidakadilan. Tetapi, dengan dukungan atas pemberlakuan sanksi ke Iran, Indonesia kehilangan kesempatan itu," kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi.

Partai Persatuan Pembangunan dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pun menyayangkan sikap pemerintah. "Sikap mendukung Resolusi PBB untuk memberi sanksi atas Iran terkesan mengikuti skenario negara adikuasa yang hanya menguntungkan Israel," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

(SUT/MZW/MAM/OKI)

KOMPAS, RABU, 28 MARET 2007

REAKSI DPR

Interpelasi Resolusi 1747 Bergulir Cepat

JAKARTA, KOMPAS — Perse-
tujuan Pemerintah Republik In-
donesia terhadap Resolusi Dewan
Keamanan Perserikatan Ban-
sa-Bangsa Nomor 1747 yang ber-
isi perluasan sanksi terhadap Iran
terkait dengan pendayagunaan
uranium mendapat reaksi keras
dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Di sela-sela rapat paripurna,
Selasa (27/3), sejumlah anggota
DPR yang dimotori Yuddy Chris-
nandi (Fraksi Partai Golkar), Si-
darto Danusubroto (Fraksi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan),
Effendy Choirie (Fraksi Ke-
bangkitan Bangsa), dan Abdillah
Toha (Fraksi Partai Amanat Na-
sional) mengulirkan usulan hak
interpelasi.

Dalam hitungan jam, usulan
itu langsung didukung kalangan
Dewan. Sampai kemarin petang
terkumpul tanda tangan 101 an-
gota DPR dari sembilan fraksi.
Hanya Fraksi Partai Demokrat
yang tidak menandatangani. Ini
merupakan usulan interpelasi
terbesar sepanjang sejarah DPR
periode 2004-2009. "Nomor 101
adalah Wakil Ketua DPR, Zaenal
Ma'arif," ucap Yuddy.

Dia optimistis interpelasi kali
ini bisa disetujui paripurna DPR.

"Belum pernah ada usulan in-
terpelasi yang didukung anggota
DPR dari sembilan fraksi. Saya

PENGUSUL INTERPELASI

- ◆ Fraksi Partai Golkar: 39 orang
- ◆ F-Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan: 8
- ◆ F-Partai Persatuan
Pembangunan: 4
- ◆ F-Partai Amanat Nasional: 20
- ◆ F-Kebangkitan Bangsa: 15
- ◆ F-Partai Keadilan Sejahtera: 10
- ◆ F-Bintang Demokrasi: 2
- ◆ F-Partai Bintang Reformasi: 2
- ◆ F-Partai Damai Sejahtera: 1

◆ Hanya Partai Demokrat yang be-
lum satu orang pun menanda-
tangani usulan interpelasi terha-
dap Resolusi 1747

berharap semangat ini mengalir
sampai ke paripurna," kata Yu-
ddy. Sidarto Danusubroto dari
PDI-P punya optimisme sama.

Effendy Choirie sebagai salah
satu motor dari gerakan ini ke-
marin langsung menemui Ketua
Umum Dewan Syura PKB Ab-
durrahman Wahid.

Umumnya, setiap usulan inter-
pelasi selalu kandas di tengah
jalan karena ada intervensi pim-
pian partai yang duduk di kabi-
net setelah dilakukan lobi di Ho-
tel Dharmawangsa. Sidarto ber-

harap kali ini hal itu tidak terjadi.
"Kalau nanti tenggelam lagi, biar
rakyat yang menilai siapa yang
konsisten berjuang," katanya.

Berdasarkan informasi yang
diperoleh *Kompas*, kemarin pe-
tang, rapat pimpinan lintas fraksi
pun kembali digelar di Bimasena,
salah satu ruangan di Hotel Dhar-
mawangsa.

Abdillah Toha menyadari bah-
wa waktu yang tersisa untuk me-
realisasikan interpelasi sangat
pendek mengingat pada 30 Maret
2007 DPR sudah menutup masa
sidang dan memasuki masa reses.
DPR bersidang kembali pada 6
Mei 2007. Dia khawatir kehi-
langan momentum.

Sekretaris Jenderal Partai Ke-
adilan Sejahtera Annis Matta juga
meminta semua anggota Fraksi
PKS di DPR menandatangani in-
terpelasi terhadap pemerintah
terkait resolusi Dewan Keaman-
an PBB yang memberikan sanksi
kepada Iran. "Kami sudah punya
kontrak politik dengan pemerin-
tahan SBY-JK agar negara tidak
tunduk pada kekuatan asing dan
komitmen memperjuangkan ke-
pentingan Islam dalam penerap-
an sikap politik bebas aktif," ujar-
nya.

Anggota Fraksi PAN Trisanti
mengatakan, PAN juga mendu-
kung interpelasi itu. (SUT/MAM)

Iran Alihkan Devisa Dollar AS

Ormas Islam Sesalkan Sikap RI

KUALA LUMPUR, SELASA — Gubernur Bank Sentral Iran Ebrahim Sheibany, Selasa (27/3), mengungkapkan, sanksi baru Dewan Keamanan PBB hanyalah "simbolik" dan tidak akan memengaruhi perekonomian Iran. Meski demikian, Iran telah mengalihkan cadangan devisa dari dollar AS ke mata uang lain.

"Sanksi itu tidak ada pengaruhnya karena tidak terkait dengan ekonomi kami. Sanksi itu hanya terkait dengan beberapa hal simbolik, contohnya mereka menjatuhkan sanksi atas persenjataan kepada negara lain," ungkap Sheibany.

Dia menambahkan, Iran bukanlah produsen utama ataupun pengeksport persenjataan ke negara lain. "Saya bisa katakan (sanksi) itu tidak akan berpengaruh buruk terhadap ekonomi kami," papar Sheibany.

Meski demikian, diungkapkan, Iran telah mengurangi cadangan devisanya dalam bentuk dollar AS ke tingkat hanya 20 persen sebagai respons atas sikap permusuhan AS terhadap Iran.

Gubernur Bank Sentral Iran itu menegaskan, ekonomi Iran bisa mengatasi sanksi-sanksi PBB dan negerinya mempunyai cukup cadangan devisa dalam bentuk mata uang asing untuk mengatasi jika terjadi guncangan besar. Namun, tidak disebutkan berapa cadangan devisa yang dimiliki Iran saat ini.

Menyusul disahkannya Resolusi DK PBB Nomor 1747, Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Javier Solana, Senin, telah menelepon ketua perunding Iran, Ali Larijani. Telepon itu untuk memperbarui kontak dan menjelaskan apa yang telah dilakukan masyarakat internasional dan keinginan negara-negara adidaya untuk membuka kembali perundingan dengan Iran mengenai paket insentif untuk mengatasi kebuntuan perundingan.

Juru bicara Solana, Cristina Gallach, menjelaskan tidak ada

pembicaraan mengenai substansi dalam pembicaraan telepon itu.

Ditambahkan, Larijani mengungkapkan penentangan Iran atas resolusi baru DK itu, tetapi menerima baik undangan untuk melakukan kontak kembali dan melakukan pembicaraan pada beberapa hari mendatang.

Cara damai

Dari pertemuan pemimpin Rusia Vladimir Putin dengan pemimpin China Hu Jintao di Moskwa, kedua pemimpin itu dalam pernyataan bersamanya menyampaikan, "Rusia dan China menekankan bahwa masalah program nuklir Iran harus diselesaikan hanya dengan cara damai, melalui perundingan."

Ditambahkan, Rusia dan China akan melakukan segala upaya untuk memastikan dimulainya kembali perundingan dengan cepat dan menemukan sebuah penyelesaian jangka panjang yang bisa diterima semua pihak.

Menyesalkan

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan sejumlah ormas Islam kembali menyesalkan sikap pemerintah yang mendukung resolusi DK PBB Nomor 1747. Resolusi itu dianggap bukan solusi damai atas masalah nuklir Iran, melainkan merupakan alasan awal untuk menyerang dan menguasai Iran.

Hal ini disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang bersama sejumlah wakil dari ormas Islam menerima Duta Besar Iran untuk Indonesia Berooz Kamalvandi di kantor Pusat Dakwah PP Mu-

hammadiyah, Jakarta, Selasa. "Kita harus mempertanyakan sikap pemerintah ini, dan Menlu Hasan Wirajuda perlu memberikan penjelasan sebenarnya," ujarnya.

Menurut Din, sikap pemerintah ini memperlihatkan keberadaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB tidak memiliki signifikansi bagi keterwakilan sebuah negara besar dan berdaulat yang dapat berperan menciptakan keseimbangan global.

Menurut Din, Indonesia seharusnya berempati kepada Iran sebagai sesama negara Islam dan anggota Gerakan Nonblok, dengan memperlihatkan sikap berani menolak resolusi PBB itu. Apalagi, suatu waktu Indonesia mungkin perlu juga membangun instalasi tenaga nuklir bagi pengembangan iptek dan kesejahteraan rakyat pada masa depan.

Berooz Kamalvandi mengatakan, instrumen DK PBB sebenarnya sudah terbukti tidak bisa menyelesaikan masalah perdamaian dunia. Contohnya, persoalan Palestina hampir 50 tahun tidak selesai.

"Apakah kegiatan Iran membangun instalasi nuklir dengan tujuan damai itu menakutkan? Kami sudah membuka semua pintu untuk diperiksa. Anehnya, ketika Israel menghancurkan negara lain, tidak pernah dianggap sebagai ancaman keamanan dunia," ujarnya.

Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Abdul Asri Harahap mengkhawatirkan, resolusi ini hanyalah langkah awal untuk menyerang Iran.

Sedangkan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR Zulkifli Hasan menilai sikap pemerintah hipokrit dan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengklarifikasi secara terbuka sikap tersebut. Jika klarifikasi dianggap belum memadai, F-PAN mendukung gagasan interpelasi yang kini bergulir di DPR.

(AFP/REUTERS/MAM/DIK/OKI)

KOMPAS, KAMIS, 29 MARET 2007

PASCA-RESOLUSI 1747

Wapres Berharap Iran Bersedia Berkompromi

Oleh SUHARTONO

RIYADH, KOMPAS — Wakil Presiden M Jusuf Kalla berharap, dalam pengayaan uranium bagi pelaksanaan program nuklirnya, Pemerintah Iran mau berkompromi dengan lembaga internasional yang khusus menangani masalah nuklir (IAEA). Kontroversi program nuklir itu tak akan mencapai penyelesaian atau titik temu jika Iran tidak mau berkompromi.

Pemerintah Iran masih mempunyai waktu 60 hari untuk mengompromikan program nuklirnya bagi perwujudan dunia yang damai. Demikian disampaikan Wakil Presiden Kalla se usai melakukan pertemuan informal dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi sebelum mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Ke-19 Liga Arab di Riyadh, Arab Saudi, Rabu (28/3).

"Yang namanya penyelesaian tentu harus ada kompromi. Saya kira, kalau semua berpegang pada

pandangan masing-masing, tentu itu tak akan pernah terjadi kompromi untuk menyelesaikan masalah itu," ujar Kalla.

Wapres juga optimistis, meski Indonesia mendukung Resolusi 1747 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), yang memberikan sanksi terhadap Iran, dukungan itu tak akan berekses negatif pada hubungan dengan Iran. "Pemerintah Iran tentu mempelajari isi resolusi," katanya.

Kamis ini Wapres akan bertemu Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon. Kalla menyatakan akan berbicara mengenai masalah perdamaian di Timur Tengah dan tindak lanjut menyusul diputuskannya Resolusi 1747 DK PBB itu.

Secara terpisah di Jakarta, Rabu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi menyatakan, pemerintah harus menjelaskan kepada negara Arab

(Bersambung ke hal 15 kol 4-7)

Wapres Berharap Iran Bersedia Berkompromi

(Sambungan dari halaman 1)

alasan Indonesia mendukung Resolusi 1747 DK PBB itu. Indonesia juga harus siap jika ditinggalkan negara Arab atas sikapnya yang dianggap menyengsarakan Iran.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menjelaskan bahwa dukungan atas resolusi DK PBB itu untuk mendorong solusi damai atas nuklir Iran dan menciptakan kawasan Timur Tengah yang bebas dari senjata pemusnah massal, termasuk nuklir.

Hasyim menilai alasan Indonesia mendukung penjatuhan sanksi bagi Iran itu tak tepat. Niat untuk menciptakan kawasan Timur Tengah yang damai justru kian menyengsarakan rakyat Iran. "Indonesia sudah menderita atas berbagai intervensi Amerika Serikat (AS), mengapa sekarang justru ingin menyebarkan penderitaan itu kepada negara lain?" kata Hasyim.

Mantan Ketua MPR Amien Rais meminta pemerintah tidak berkilah dengan beragam alasan setelah menyetujui Resolusi 1747. Dukungan itu menunjukkan politik luar negeri Indonesia belum bebas aktif dan masih di bawah bayang-bayang AS.

Amien juga menyayangkan pemerintah tak pernah belajar dari masa lalu. "Dulu Indonesia paling akhir mendukung PLO (Organisasi Pembebasan Palestina). Padahal, Manila dan Kuala Lumpur

sudah menerima. Akibatnya, negara Arab abstain, tak mau memberikan dukungan kepada Indonesia saat kita mencoba menghilangkan agenda soal Timor Timur dari sidang PBB," ujarnya.

Interpelasi bergulir

Upaya anggota DPR menggalakan penggunaan hak interpelasi atas sikap Indonesia yang menyetujui Resolusi 1747 DK PBB itu terus berlangsung. Usul penggunaan hak interpelasi yang ditandatangani 129 anggota DPR disampaikan kepada Ketua DPR Agung Laksono, Rabu.

Nama Agung pun ditambahkan sebagai salah satu pengusul. Dari total 130 nama anggota DPR yang menjadi pengusul itu, tidak ada yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat.

Pengusul interpelasi itu, antara lain, Abdillah Toha, Sidarto Danusubroto, Effendy Choirie, Yuddy Chrisnandi, Ryaas Rasyid, dan Ali Mochtar Ngabalin, meminta Ketua DPR segera membacakan usulan itu dalam rapat paripurna DPR, Kamis, karena Jumat besok ada penutupan masa sidang.

Jika usul interpelasi itu disetujui anggota DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan tak mewakilkan, tetapi hadir langsung memberikan penjelasan. Pengusul juga menekankan, interpelasi tidak bisa dipandang sebagai upaya menjatuhkan pemerintah. Justru langkah itu

memberikan kesempatan bagi Presiden untuk menjelaskan hal yang dirasa belum jelas.

Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, urgensi kerakyatan usul interpelasi itu kurang sebab yang diurus adalah kepentingan negara lain. Interpelasi mestinya dipakai untuk membela kepentingan nyata dari rakyat yang diwakili.

Usul interpelasi itu kegenitan politik. Anas menyarankan agar pemahaman dasar politik luar negeri dikembalikan pada basis kepentingan nasional, bukan karena tak suka kepada AS atau suka kepada Iran. Kepentingan nasional sekarang adalah perbaikan kondisi ekonomi rakyat, bukan gagah-gagahan menghadapi negara lain. Menlu perlu menjelaskan kaitan sikap Indonesia itu dengan kepentingan nasional.

Dukungan moral

Hasyim menambahkan, usulan sejumlah anggota DPR mengajukan hak interpelasi atas sikap pemerintah mendukung resolusi DK PBB menunjukkan dukungan moral terhadap bangsa Iran. Upaya itu juga merupakan bukti usaha berbagai pihak di Indonesia untuk menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah yang dianggap keliru.

Meski demikian, efektif tidaknya pengajuan interpelasi itu dalam membantu rakyat Iran keluar dari krisis atau memperbaiki hubungan antara Indonesia dan

Iran sangat ditentukan oleh DPR dan pemerintah sendiri.

Hasyim berharap hubungan Indonesia dengan Iran tetap baik. Demikian pula hubungan antar-elemen rakyat di kedua negara.

Terlebih lagi, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan ulama Timur Tengah pada awal April nanti. Pertemuan ulama berpengaruh dari sejumlah negara dan dari berbagai aliran itu untuk mencari solusi damai atas konflik di Timur Tengah.

Sebaliknya, Amien Rais pesimistis anggota DPR bersungguh-sungguh memperjuangkan hak interpelasinya. "Tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman di DPR, biasanya mereka hangat-hangat tahi ayam. Satu dua minggu membubung setelah itu dingin, lalu hilang," katanya.

Menyikapi reaksi publik terhadap sikap pemerintah itu, rapat Komisi I DPR, Rabu, sepakat segera memanggil Menlu Hassan Wirajuda. "Kami undang Menlu ke DPR Kamis malam," ujar Ketua Komisi I Theo L Sambuaga.

Rabu, perwakilan Front Anti-intervensi Amerika dan Forum Umat Islam menemui Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno dan Zaenal Ma'arif. Seseorang dari mereka bertopeng Presiden AS George W Bush dan membawa anak kambing bertuliskan "SBY" sebagai simbolisasi Pemerintah Indonesia yang dinilai tak lebih dari pendukung AS dan Israel. (DIK/MZW/DIK/SUT/MT)

KOMPAS, JUMAT, 30 MARET 2007

Lobi Dharmawangsa Tak Bisa Bendung Interpelasi

Pengusul Malah Terus Bertambah di DPR

JAKARTA, KOMPAS — Untuk membendung gerakan interpelasi soal Iran, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie dan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, difasilitasi Fraksi Partai Demokrat, Selasa malam mengundang pimpinan fraksi di DPR bertemu di Hotel Dharmawangsa, Jakarta.

Menurut seorang peserta pertemuan, yang tak mau disebutkan namanya, Menko Kesra berharap pengajuan hak interpelasi itu tak berlanjut. Ini harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pertemuan itu dihadiri sekitar 15 pengurus fraksi dan anggota Komisi I DPR. Sementara Fraksi Partai Demokrat DPR, Kamis (29/3), yakin pengajuan hak in-

terpelasi itu akan terhenti.

"Mereka yang tanda tangan itu kan tak tahu masalah. Kalau nanti sudah tahu substansinya, mereka akan merasa tak perlu," ucap Ketua F-PD DPR Syarif Hasan.

Ia yakin pertemuan di Hotel Dharmawangsa itu akan membuahkan hasil. Dalam pertemuan itu disepakati perlunya sosialisasi. "Lihat saja nanti," ucapnya.

Rabu pagi usulan interpelasi itu tetap disampaikan ke pimpinan DPR. Ketua DPR Agung Laksono serta Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno dan Zaenal Ma'arif menandatangani pengajuan interpelasi pula.

Dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis, usulan interpelasi pun diumumkan. Pendukung pengajuan hak itu, menurut Yuddy Chrisnandi, inisiator interpelasi dari Fraksi Partai Golkar, terus mengalir, dari 132 tanda tangan bertambah menjadi 181.

Ali Mochtar Ngabalin dari Fraksi Bintang Demokrasi yakin pengajuan hak interpelasi itu tak mungkin dibendung.

Kamis malam, Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan

Menlu. Jumat ini sejumlah tokoh dan anggota organisasi massa juga akan mendatangi Gedung DPR untuk memberikan dukungan pada pengajuan interpelasi.

Di Makassar, Kamis, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Sulawesi Selatan berunjuk rasa memprotes sikap pemerintah yang mendukung Resolusi 1747 DK PBB.

Berdasarkan Pasal 174 Tata Tertib DPR, apabila usul interpelasi disetujui sebagai interpelasi DPR, pimpinan DPR menyampaikan kepada Presiden. Presiden akan diundang untuk memberikan keterangan. Terhadap keterangan Presiden itu, anggota DPR bisa mengajukan pertanyaan. (SUT/DOE)

KOMPAS, MINGGU, 1 APRIL 2007

Komisi I DPR Kecewa

Menhan: Resolusi karena Salah Iran Sendiri

JAKARTA, KOMPAS — Perdebatan mengenai persetujuan Indonesia terhadap Resolusi 1747 Dewan Keamanan PBB tentang sanksi terhadap Iran semakin memanas. Dalam rapat kerja antara Komisi I DPR dan Menteri Luar Negeri, Kamis lalu, kekecewaan mendalam sebagian anggota Komisi I mengemuka.

Karena itu anggota DPR sekaligus menyatakan komitmen untuk terus menggalang dukungan pengajuan hak interpelasi. Hingga Kamis, telah terkumpul 181 tanda tangan anggota DPR dari berbagai fraksi yang menyetujui penggunaan hak interpelasi. **(Baca juga halaman 5.)**

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Negara, Jumat (30/3), menegaskan, Indonesia tetap konsisten, yaitu agar permasalahan nuklir Iran ini dapat diselesaikan secara damai. "Indonesia menolak penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran," ujarnya.

Dalam rapat kerja bersama Menlu, Komisi I DPR mempertanyakan apa keuntungan Indo-

nesia dengan mendukung resolusi tersebut. "Apa yang kita dapat dari AS?" kata Abdillah Toha dari Fraksi PAN.

"Klausul perubahan draf resolusi dari Indonesia tidak berarti apa-apa karena hanya tambahan dari sanksi besar terhadap Iran," kata Toha. Abdillah juga menyebutkan resolusi itu hanya didasarkan dugaan yang belum terbukti, diskriminatif, berpotensi menimbulkan radikalisme, dan mengahpus itikad baik pada masa lalu.

Hal senada diungkapkan Sabam Sirait dari Fraksi PDI-P. "Apa ada untungnya Indonesia mendukung resolusi? Apa Iran akan mematuhi?" ujar Sabam.

Sutradara Gintings dari Fraksi PDI-P juga menilai sikap Indonesia merupakan kesalahan strategis jangka panjang. Menurut

dia, seharusnya Indonesia bersikap abstain karena keputusan Indonesia tidak akan mengubah apa-apa. "Jika alasan pemerintah adalah mendukung solusi damai, apakah sikap abstain tidak lebih kondusif?" katanya.

Dalam kesimpulan sikap yang dibacakan Ketua Komisi I Theo L Sambuaga, Komisi I menyatakan kecewa karena resolusi itu tidak sesuai aspirasi rakyat Indonesia.

RI tak tunduk

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menilai Resolusi 1747 yang menjatuhkan sanksi terhadap Iran justru disebabkan kesalahan negara itu sendiri.

Menurut dia, sikap bersikeras Iran selama ini dengan mengabaikan desakan PBB untuk menunda sementara waktu program nuklir justru berdampak dijatuhkannya sanksi. "Penundaan itu bertujuan meyakinkan masyarakat dunia bahwa program pengayaan nuklir Iran memang tidak akan ditujukan untuk mengembangkan persenjataan nuklir. Oleh karena itu, Indonesia kemudian setuju ikut menandatangani resolusi," ujar Juwono.

Juwono menambahkan, sikap keras Iran mengecewakan tiga negara anggota DK PBB, yaitu Qatar, Afrika Selatan (Afsel), dan Indonesia, yang selama ini berupaya keras membela dan memperjuangkan Iran agar tetap bisa mengembangkan program nuklir untuk tujuan damai.

"Kalau dilacak secara mendalam, sejarah keberadaan Indonesia beserta Afsel dan Qatar di DK PBB justru untuk menyelamatkan Iran. Iran justru tidak mau berupaya membangun kepercayaan," ujar Juwono.

Sikap Indonesia mendukung Resolusi 1747 justru menunjukkan konsistensi Indonesia terhadap kebijakan politik bebas-aktif yang tidak berkiblat pada kepentingan Barat atau kepentingan negara-negara Islam atau Timur Tengah. "Indonesia tidak bertujuan pada AS atau Iran. Dengan meminta Iran bersedia menghentikan sementara program pengayaan nuklirnya dan diawasi oleh salah satu konsorsium, Indonesia justru bersikap konsisten terhadap politik luar negeri bebas aktif," ujar Juwono.

(SUT/MZW/MAM/DWA/FRO)

RESOLUSI 1747 DK PBB

Golkar Siapkan Tiga Opsi Interpelasi

MAKASSAR, KOMPAS — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, yang juga Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengemukakan, partai yang dipimpinnya menyiapkan tiga opsi untuk menanggapi bergulirnya hak interpelasi yang digalang di Dewan Perwakilan Rakyat.

Interpelasi diajukan DPR untuk mempertanyakan sikap pemerintah dalam Resolusi 1747 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Tiga opsi yang disiapkan itu, pertama, adalah pemerintah akan menjelaskan sikapnya mengenai isu nuklir Iran di Komisi I DPR. Kedua, memberikan penjelasan tertulis ke DPR, dan ketiga, jika interpelasi disetujui, Presiden akan memberikan penjelasan.

Jusuf Kalla dalam jumpa pers di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/3) malam, mengatakan, terhadap upaya dan inisiatif politik di DPR untuk menggunakan hak interpelasi, ia telah menghubungi kader-kader Partai Golkar di DPR, seperti Ketua Fraksi Golkar DPR Andi Mattalatta, Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga, dan salah satu penggagas interpelasi, Yuddy Chrisnandi.

"Saya sudah jelaskan, anggapan bahwa negara Islam marah dengan sikap kita dan Resolusi DK PBB tidak benar. Tunjukkan negara Islam mana yang protes?" ujar Kalla.

Kalla yang akhir pekan lalu kembali dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab merasa yakin, sikap Indonesia dalam menanggapi isu nuklir Iran tepat karena memberi waktu untuk berdamai. Dari 20 peserta KTT Liga Arab dan empat negara Muslim yang datang sebagai peninjau, tidak ada satu pun yang mempersoalkan Resolusi 1747.

Terkait dengan sikap Indonesia dalam Resolusi 1747 DK PBB, Kalla menceritakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah berbicara dengan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad agar

mundur sedikit dari sikap awalnya sebelum resolusi dikeluarkan. Akan tetapi, Presiden Ahmadinejad tidak mau mundur sedikit pun untuk berkompromi. Terhadap sikap Indonesia, Presiden Iran tidak akan kaget.

Salah persepsi

Kalla menilai, terkait masalah nuklir Iran, banyak orang di Indonesia dan juga politisi serta beberapa pemimpin salah persepsi. Kesalahan persepsi terjadi karena tak diperoleh dan tak dipahaminya informasi soal Resolusi 1747 secara tepat dan utuh.

Sementara itu, legislatif dan eksekutif terus "bertarung" menyusul adanya persetujuan Indonesia terhadap resolusi DK PBB yang memberikan sanksi kepada Iran terkait program pengayaan uranium.

Jumat pagi, Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali, yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, bersama Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, misalnya, memberikan penjelasan tentang sikap pemerintah kepada anggota Fraksi PPP di Gedung DPR. Menlu juga mengatakan hal serupa akan dilakukan kepada fraksi lain.

Selasa lalu, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, yang juga Penasihat Partai Golkar, bersama Hassan Wirajuda mengundang pimpinan lintas fraksi di Hotel Dharmawangsa. Kamis malam, Hassan Wirajuda juga memberikan penjelasan pada Rapat Kerja Komisi I DPR hingga pukul 01.30.

Sementara itu, para inisiator gerakan interpelasi terus gencar menyosialisasikan gagasannya, baik kepada sesama anggota Dewan maupun pimpinan fraksi. Sampai Jumat lalu, tanda tangan sudah terkumpul melebihi separuh anggota DPR, mencapai 278 tanda tangan. Total anggota DPR 550 orang.

(JON/AB8/SUT/MZW/MAM/TNU)

KOMPAS, SELASA, 3 APRIL 2007

RESOLUSI 1747

Pengajuan Hak Interpelasi Hanya untuk Minta Penjelasan

PALANGKARAYA, KOMPAS — Ketua DPR Agung Laksono menyatakan, DPR mengajukan hak interpelasi hanya untuk meminta penjelasan pemerintah dalam menyikapi Resolusi 1747 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DK PBB. DPR tak memiliki niat untuk memakzulkan pemerintah.

"DPR ingin klarifikasi dari pemerintah, mengapa yang selama ini dikenal mendukung pengembangan nuklir Iran untuk tujuan damai tiba-tiba di Sidang DK PBB mendukung resolusi yang isinya memberi sanksi perekonomian

yang lebih luas kepada Iran karena dianggap melakukan pengayaan uranium untuk tujuan senjata pemusnah massal," kata Agung yang ditemui pada Musyawarah Daerah Luar Biasa Partai Golkar Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Senin (2/4).

Menurut Agung, tidak ada alasan tak memercayai Iran. Apalagi, hampir semua pejabat tinggi Iran datang ke Indonesia, menjelaskan soal pengembangan nuklir.

"Mengenai interpelasi sudah dibacakan di rapat paripurna. Keputusan rapat paripurna, sesuai mekanisme Dewan, akan diterus-

kan ke badan musyawarah untuk dijadwalkan. Jika lolos dijadwalkan akan diteruskan untuk diproses sampai ke sidang paripurna berikutnya," kata Agung.

Dijelaskan, ada 285 anggota DPR dari sembilan fraksi yang menyetujui interpelasi. "Setahu saya, anggota DPR hanya bertanya agar pemerintah menjelaskan kepada publik melalui DPR. Tak ada maksud untuk meng-*impeach*," kata Agung. Presiden bisa menjelaskan langsung kepada DPR atau diwakili pejabat lain.

Di Jakarta, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH

Hasyim Muzadi menyatakan, sikap Pemerintah Indonesia yang mendukung Resolusi 1747 DK PBB mengecewakan ulama syiah di Timur Tengah. Mereka pun memastikan tak hadir pada Pertemuan ulama sunni dan syiah untuk mencari solusi konflik berkepanjangan di Timur Tengah di Istana Bogor, Selasa (3/4) ini. Ulama sunni yang hadir juga baru dari kalangan ilmiah.

Tim Pengacara Muslim akan mengajukan *class action* (gugatan perwakilan kelas) atas sikap Indonesia mendukung Resolusi 1747 DK PBB. (CAS/MZW)

RESOLUSI DK PBB 1747

OKI Memahami Sikap Indonesia soal Iran

JEMBER, KOMPAS — Negara-negara di Timur Tengah dan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam atau OKI memahami sikap Indonesia yang menyetujui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1747.

Setelah pertemuan di DK PBB, Indonesia langsung mengirim kata ke negara-negara itu mengenai sikap Indonesia yang menyetujui resolusi tersebut.

Hal itu diungkapkan Andi Rachmianto dari Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Departemen Luar Negeri di sela-sela seminar "Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia di DK PBB" yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember (Unej), Kamis (5/4).

Selain Andi Rachmianto, juga tampil K Candra Negara dari Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Deplu serta dosen Hubungan Internasional FISIP Unej Sunardi Purwanto.

"Mungkin Iran kecewa, tetapi tidak sampai merasa sakit hati karena sejak awal pemerintah tidak ingin menyakiti umat Islam

di Indonesia," katanya.

Proses pengambilan keputusan hingga menyetujui resolusi tersebut, kata Andi Rachmianto, pemerintah sudah membicarakan sikapnya dengan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri.

“

Indonesia juga mendukung program nuklir Iran karena hal itu merupakan hak setiap negara.

Andi Rachmianto

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lanjutnya, telah berbicara dengan Presiden Iran mengenai masalah tersebut.

"Indonesia juga mendukung program nuklir Iran karena hal itu merupakan hak setiap negara, tetapi kami pun menentang terhadap negara-negara yang ingin mengembangkan senjata nuklir.

Sejauh ini Indonesia berpendirian, apa yang telah dilakukan Iran sesuai dengan haknya," kata Andi.

Dikembalikan ke IAEA

Disebutkan, DK PBB tidak memiliki kemampuan teknis, apakah program nuklir suatu negara digunakan untuk maksud-maksud damai atau perang.

Pihak yang paling berkompeten menangani hal itu adalah Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) yang berkedudukan di Wina. Otoritas pengawasan diberikan kepada IAEA untuk memeriksa program nuklir di semua negara, apakah dilaksanakan untuk keperluan damai atau militer.

Ditanya apakah Indonesia yakin resolusi yang disetujui itu tidak dimanfaatkan Amerika Serikat untuk menyerang Iran, seperti yang dilakukan terhadap Irak, Andi Rachmianto mengungkapkan, justru dengan resolusi itu Indonesia berharap agar isu nuklir Iran dikembalikan kepada IAEA.

"Karena DK PBB tidak punya kemampuan secara teknis meneliti program nuklir suatu negara," lanjutnya. (SIR)

Kemandirian RI Digugat

Diakui, Peranan Indonesia di Kancah Internasional Tak Menonjol

BANDUNG, KOMPAS — Kemandirian dan kepercayaan diri bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial, digugat. Kebijakan pemberian dukungan resolusi PBB mengenai sanksi Iran dianggap bukti ketidakberdayaan Indonesia menghadapi pengaruh kekuatan negara adikuasa.

Gugatan ini muncul dalam seminar "Quo Vadis Kemandirian Indonesia" di Sasana Budaya Ganesha, Sabtu (7/4). Hadir sebagai pembicara tokoh reformasi nasional Amien Rais, pengamat komunikasi Jalaluddin Rakhmat, dan pengamat nuklir dari Institut Teknologi Bandung Eng Zaki Su'ud.

Mantan Ketua MPR Amien Rais mengatakan, bangsa Indonesia mengalami krisis kemandirian dan kepercayaan diri. Ini tecermin dari sejumlah kebijakan dalam maupun luar negeri yang terkesan lebih mengakomodasi kepentingan negara-negara asing pemilik modal ketimbang masyarakatnya sendiri.

Terakhir, dalam kasus pembe-

rian dukungan pemerintah terhadap sanksi nuklir Iran. "Saya setuju jika bersama-sama mengutuk resolusi ini. Kebijakan ini kan tidak lebihnya politik apartheid negara-negara adikuasa. Negara dengan kasus yang sama bisa mendapat perlakuan berbeda," ujarnya.

Intervensi asing

Menyikapi kebijakan politik luar negeri itu, Amien ikut mencurigai adanya intervensi atau lobi-lobi pihak asing, khususnya Amerika Serikat (AS), terhadap pemerintah. Entah itu terkait persoalan politik maupun ekonomi. Secara khusus, ia juga ikut mengkritisi kemunculan Undang-Undang Penanaman Modal

yang dianggapnya sarat kekuatan ekonomi kapitalis.

"Setelah banyak aset kita dijual, kini muncul UU Penanaman Modal. Bagaikan pertandingan tinju, penanam modal lokal dan asing itu layaknya Chris John diadu dengan Mike Tyson. Sudah kalah secara fisik, tangan kanan Chris John ini diikat," katanya.

Jalaluddin Rakhmat mengatakan, krisis kebijakan nasional akhir-akhir ini tidak terlepas dari persoalan lemahnya *sense of nation*. Sikap yang, menurut dia, hampir jarang dimiliki pemimpin maupun generasi muda saat ini.

"Kondisi ini bisa terjadi karena generasi dan pemimpin lama bangsa ini tidak menurunkan sikap ini ke generasi berikutnya. Bandingkan dengan Iran dengan tokoh Ahmadinejad-nya dan Venezuela dengan Morales-nya. Di Iran, pemimpinnya berani bersikap demikian semata karena kemandirian dan tingginya *sense of nation*," paparnya.

Pengamat nuklir dari ITB, Zaki Su'ud, mengungkapkan, sanksi yang diberikan PBB terhadap

Iran semestinya juga diberlakukan sama terhadap setidaknya India dan Korea Selatan.

"Bom nuklir itu kan bisa dikembangkan berdasarkan dua jenis, yaitu *enrichment* uranium ke arah 93 persen seperti Iran. Atau pun *re-processing* plutonium yang kini dikembangkan Korsel. India pun juga melakukan hal sama. Anehnya, kenapa India justru mendapat dukungan Amerika?" ujarnya.

Kekuatan ekonomi

Di tempat terpisah, di sela-sela sesi tanya jawab sesuai kuliah umum di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, peranan Indonesia di kancah konflik internasional tidaklah bisa terlalu menonjol akibat lemahnya posisi secara kekuatan ekonomi maupun militer. Diakui, dua kekuatan itu ikut menentukan dalam upaya penyelesaian konflik internasional.

Mengenai sikap Indonesia terhadap resolusi PBB, sekali lagi ia menegaskan, tidak akan ada pi-

hak yang dilukai. Termasuk, kekhawatiran negara Islam akan mengucilkan Indonesia dalam pergaulan internasional. Sebaliknya, ia meyakini, negara-negara Islam yang tergabung dalam Liga Arab memaklumi keputusan Indonesia.

"Saat saya hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (Liga Arab) lalu, tidak ada satu negara pun yang mempertanyakan putusan Indonesia. Malahan, mereka punya kekhawatiran sama terhadap nuklir Iran. Bahwa jangan-jangan moncong senjata tidak diarahkan ke negara luar, justru negara tetangga. Mengingat, fakta sejarah berbicara demikian," paparnya.

Di Bandung, terjadi unjuk rasa sekitar 50 mahasiswa atas perlakuan AS dan sekutunya terhadap Iran. Di depan Gedung Sasana Budaya Ganesha, para mahasiswa mengumpulkan tanda tangan dan mengajak partisipasi masyarakat yang lewat untuk ikut terlibat.

Salah satunya adalah Amien Rais yang ikut membubuhkan tanda tangan. (JON/BAY)

Perjalanan Proses Interpelasi terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747

◆ 27 Maret 2007

Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1747 yang berisi perluasan sanksi terhadap Iran terkait dengan penayagunaan uranium mendapat reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat.



◆ 28 Maret 2007

Upaya anggota DPR menggulirkan penggunaan hak interpelasi atas sikap Indonesia yang menyetujui Resolusi 1747 DK PBB itu terus berlangsung. Usul penggunaan hak

Sumber: Litbang Kompas/Endang S



interpelasi ditandatangani 129 anggota DPR.

◆ 30 Maret 2007

181 anggota DPR dari berbagai fraksi menyetujui penggunaan hak interpelasi sekaligus menyatakan komitmen untuk terus menggálang dukungan pengajuan hak interpelasi.

◆ 15 Mei 2007

Usulan penggunaan hak interpelasi yang diajukan 280 anggota Dewan

tentang Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia atas Resolusi DK PBB No 1747 yang berisi perluasan sanksi terhadap Iran.

◆ 25 Mei 2007

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono mengirimkan surat soal langkah DPR yang akan melakukan interpelasi soal Iran kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua DPR secara implisit meminta Presiden hadir langsung di sidang paripurna.

◆ 5 Juni 2007

Presiden tidak hadir dalam sidang paripurna dan diwakilkan kepada Menko Polkam Widodo AS,

Mensesneg Hatta Rajasa, dan Menlu Hassan Wirajuda. Sidang ditunda.

◆ 11 Juni 2007

Pimpinan DPR telah mengirimkan surat bersifat penting kepada Presiden untuk membicarakan rencana penyampaian keterangan Presiden terhadap interpelasi Iran. Sejumlah anggota Dewan tetap mengharapkan Presiden hadir di sidang paripurna.

◆ 18 Juni 2007

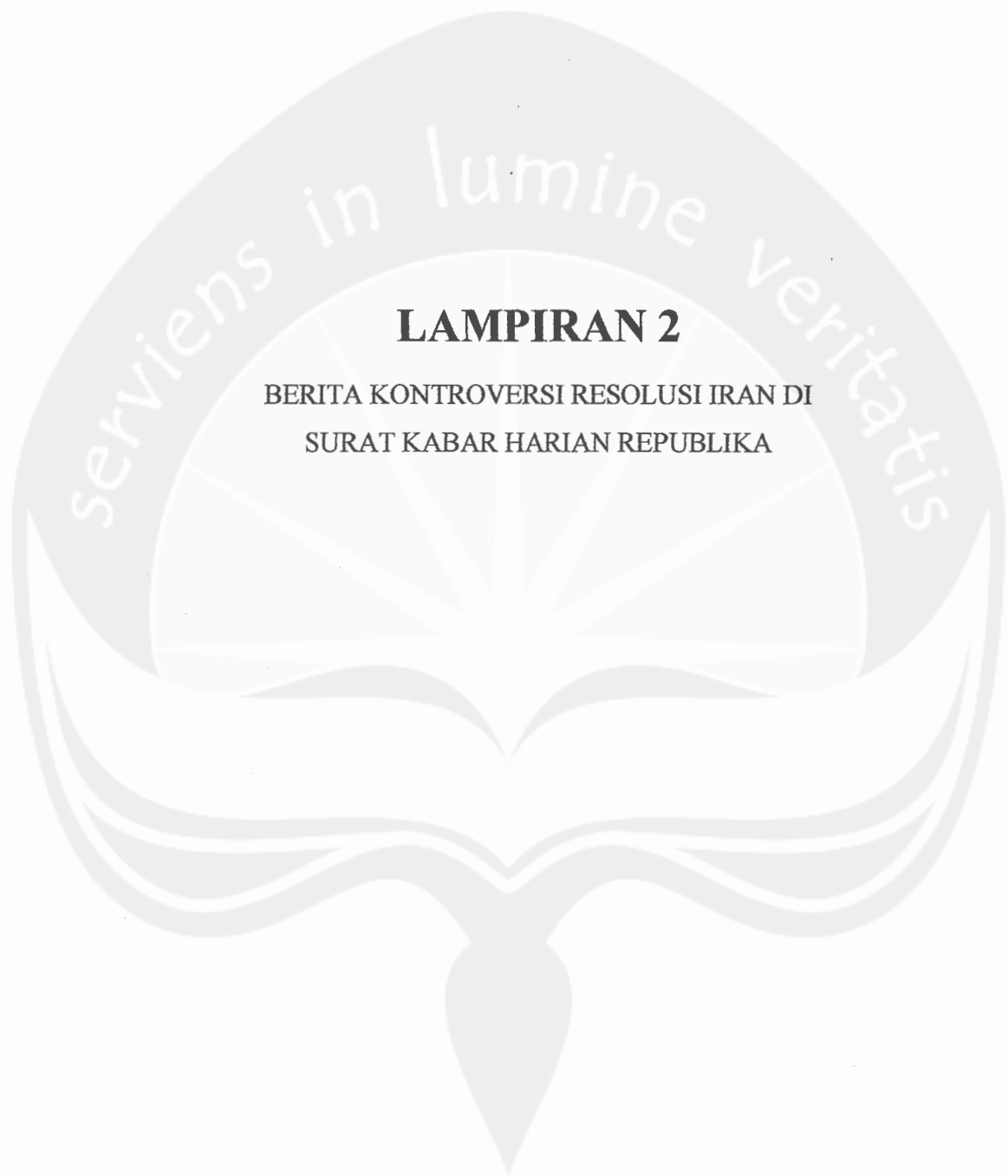
Rapat konsultasi pimpinan DPR dengan Presiden dan Wakil Presiden di Istana Kepresidenan berakhir tanpa hasil yang jelas.

◆ 2 Juli 2007

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan memenuhi undangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghadiri rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pemerintah yang dilaksanakan pada Selasa, 3 Juli, malam.



LUHUR/GUNAWAN



LAMPIRAN 2

**BERITA KONTROVERSI RESOLUSI IRAN DI
SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA**

BERITA UTAMA
Senin, 26 Maret 2007

DK PBB Jatuhkan Sanksi untuk Iran
Indonesia terkesan mengikuti skenario negara adikuasa.

NEW YORK -- Dewan Keamanan (DK) PBB menjatuhkan sanksi bagi Iran melalui Resolusi 1747. Rancangan resolusi yang dirumuskan Inggris, Prancis, dan Jerman itu disepakati secara bulat oleh 15 negara anggota DK PBB, termasuk Indonesia, Sabtu (24/3) di markas PBB, New York.

Resolusi ini memperluas sanksi atas Iran yang ditetapkan pada Desember 2006 dalam Resolusi 1737. Di antara isi Resolusi 1747 adalah larangan secara menyeluruh ekspor senjata Iran maupun pembatasan penjualan senjata ke Iran. Isi resolusi juga membekukan aset milik 28 lembaga atau perorangan yang berhubungan dengan program nuklir dan rudal Iran.

Iran juga dibatasi untuk memperoleh bantuan keuangan. DK PBB memberi batas waktu 60 hari setelah resolusi agar Iran menghentikan program nuklirnya. Jika diabaikan, DK bisa mengambil langkah yang lebih pantas berupa sanksi ekonomi, bukan militer.

Anggota Komisi I DPR RI, Soeripto, menyesalkan sikap Indonesia, sebagai anggota tidak tetap DK PBB, yang ikut secara aklamasi menyepakati sanksi baru atas Iran. Mestinya, Indonesia bisa mengambil sikap abstain, dan kalau berani bahkan menolak sanksi tersebut. "Jadinya Indonesia seakan memberi dukungan kepada AS," kata Soeripto.

Sikap Indonesia mendukung resolusi, menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, terkesan mengikuti skenario negara adikuasa yang hanya menguntungkan Israel. Tidak ada alasan menentang program nuklir suatu negara selama untuk kepentingan damai. "Kalau mau konsisten maka sebaiknya Indonesia juga mendesak sanksi atas semua negara yang mengembangkan nuklir, termasuk Israel dan AS."

Menlu Iran, Manouchehr Mottaki, saat pidato di depan DK PBB, menegaskan bahwa negaranya bukanlah agresor. "Iran tak ingin mencari konfrontasi maupun melakukan hal yang di luar batas hak. Saya dapat meyakinkan bahwa tekanan dan intimidasi tidak bakal mengubah kebijakan Iran," kata Mottaki.

Iran, tambahnya, bukan representasi negara yang menebar ancaman bagi keamanan dan kedamaian internasional. "Ini keempat kalinya dalam kurun 12 bulan terakhir sebuah resolusi diputuskan segelintir anggota DK. Kini DK disalahgunakan untuk sebuah aksi terhadap program nuklir damai Iran," tegas Mottaki.

Wakil Menlu AS, Nicholas Burns, menyambut baik sanksi baru bagi Iran. Iran akan terisolasi dari pergaulan internasional bila tak mematuhi resolusi ini. "Kami sangat senang dengan kekuatan resolusi ini," katanya.

Wakil Tetap RI untuk PBB, Rezlan Ishar Jenie, menyatakan, Indonesia mendukung pengesahan resolusi soal penambahan sanksi terhadap Iran karena sanksi yang dijatuhkan sifatnya bertahap. Bahkan, bisa dihentikan jika Iran melakukan langkah-langkah seperti tertuang dalam resolusi.

Pokok-pokok perubahan yang diinginkan RI juga telah tertampung dalam resolusi, terutama keinginan menjadikan kawasan Timur Tengah bebas senjata pemusnah massal. Rezlan membantah keras sikap setuju RI karena mendapat tekanan Amerika Serikat (AS).

"Justru Indonesia berhadapan dengan AS. Malah ada hal-hal yang kita pertanyakan dalam rancangan resolusi. Itu jelas memperlihatkan kita punya prinsip-prinsip yang diperjuangkan," kilah Rezlan.

Di sisi lain, Indonesia mendukung Iran untuk mengembangkan nuklir guna keperluan damai. Penyelesaian masalah Iran tidak boleh mengubah hak semua negara pihak Traktat Non-Proliferasi, termasuk Iran. "Itu tetap menjadi hak yang melekat pada semua negara pihak Traktat yang harus dihormati."

(ap/afp/ant/fer/has)

Sumber:

http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=287480&kat_id=3

BERITA UTAMA
Selasa, 27 Maret 2007

DPR Galang Interpelasi Nuklir Iran
Pemerintah dinilai telah melanggar UUD 1945.

JAKARTA -- Keputusan RI ikut menyetujui penjatuhan sanksi Dewan Keamanan (DK) PBB terhadap Iran disesalkan banyak kalangan. Bahkan, beberapa anggota Komisi I DPR lintas fraksi sepakat menggalang hak interpelasi.

Mereka menilai dukungan Pemerintah RI itu melanggar UUD 1945. Sejumlah penggalang hak interpelasi itu adalah Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDIP, Sidarto Danusubroto; Ali Mochtar Ngabalin (FBPD), Abdillah Toha (FPAN), Yuddy Chrisnandi dan Hajriyanto Tohari (FPG); Effendy Choirie (FKB); RK Sembiring Meliala (FPDIP), Bachroum Siregar (FPBR); dan Untung Wahono (FPKS).

Pemerintah, menurut Abdillah Toha, telah mendukung resolusi yang bertentangan dengan nilai-nilai UUD 1945 pasal 28C ayat (1). Isinya, setiap orang berhak mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan umat manusia. "Iran mengembangkan nuklir untuk kesejahteraan rakyatnya," ujar Abdillah di Jakarta, Senin (26/3).

Akibat dukungan itu, Pemerintah RI telah kehilangan kredibilitas di mata negara-negara dunia ketiga. Upaya RI menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik Timur Tengah secara damai, dengan sendirinya kandas. "Posisi Indonesia di DK yang dianggap merepresentasikan negara dunia ketiga menjadi tak berguna lagi."

Dukungan terhadap Resolusi 1747, kata Sidarto, tak lepas dari tunduknya Indonesia atas tekanan AS. Bukan tak mungkin, sambung Effendi Choirie, sikap pemerintah itu bisa berujung pada *impeachment*. "Tapi, yang pertama kita gunakan hak interpelasi dulu karena pemerintah telah keluar dari garis pencetus Gerakan Non-Blok dan anggota OKI."

Solidaritas Indonesia terhadap dunia Islam, tambah Yuddy, dengan kasus Resolusi 1747 itu, kini diragukan. "Deplu gagal mempertahankan eksistensi politik luar negeri kita yang bebas aktif."

Wakil Ketua MPR, AM Fatwa, menilai persetujuan RI tersebut sebagai bentuk tidak konsistennya pemerintah soal Iran. Sikap RI itu tak mencerminkan aspirasi rakyat maupun politik di dalam negeri. Indonesia juga tak menunjukkan sikap sebagai negara berdaulat dan bersahabat dengan negara-negara Islam.

"Pemerintah tidak konsisten dengan komitmen mendukung penggunaan nuklir bagi tujuan damai yang pernah disampaikan Presiden Iran dan Ketua Parlemen Iran saat berkunjung ke Indonesia," kata Fatwa.

Pemerintah, menurut Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, telah melakukan *blunder* besar karena mendukung penjatuhan sanksi ke Iran. Bisa saja, katanya, umat Islam mengambil jarak dengan pemerintah akibat keputusannya itu.

"Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim," kata Hasyim. Dia mengaku kewalahan menerima protes keras dari tokoh dan ulama terkemuka dunia, akibat sikap RI yang mendukung Resolusi 1747 tersebut.

Namun, Menlu RI, Nur Hassan Wirajuda, membantah pemerintah telah berubah sikap dalam isu nuklir Iran. "RI berkepentingan agar resolusi itu berimbang, karena sebagai negara penanda tangan pakta untuk tidak mengembangkan senjata nuklir (NPT, *Non-Proliferation Treaty*), Iran dan juga kita punya hak mendapat keuntungan dari program nuklir, tapi juga punya kewajiban."

Sikap RI, kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menunjukkan keberadaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB tak memiliki signifikansi bagi keterwakilan sebuah negara besar dan berdaulat yang berperan menciptakan keseimbangan global.

(yus/eye/lan/ant)

Sumber:

http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=287578&kat_id=3

BERITA UTAMA
Rabu, 28 Maret 2007

Dukungan Interpelasi Menguat

Usulan interpelasi akan disampaikan sebelum reses DPR.

JAKARTA -- Dukungan terhadap pengajuan hak interpelasi DPR atas sikap pemerintah yang menyetujui penjatuhan sanksi Dewan Keamanan (DK) PBB kepada Iran, terus menguat. Hanya dalam waktu satu jam 20 menit, sebanyak 89 anggota dewan lintas fraksi membubuhkan tanda tangan sebagai bukti persetujuan.

"Ini merupakan respons terbesar dalam sejarah DPR periode 2004-2009. Dukungan ini akan terus mengalir. Saya optimistis bisa mencapai separuh jumlah anggota dewan," kata salah seorang penggagas hak interpelasi dari Komisi I DPR, Yuddy Chrisnandi, di Jakarta, Selasa (27/3).

Dukungan dari 89 anggota DPR telah memenuhi syarat minimal pengajuan hak interpelasi. Antusiasme anggota dewan merupakan cermin aspirasi masyarakat Indonesia terhadap pengembangan nuklir damai Iran. "Ini persoalan serius yang harus diperhatikan pemerintah. Tidak cukup hanya melalui retorika Menlu," kata Yuddy. Draf interpelasi dan tanda tangan anggota dewan akan segera disampaikan kepada pimpinan DPR. Sesuai mekanisme, pimpinan dewan akan menyerahkan ke Bamus DPR. Selanjutnya, Bamus DPR yang mengagendakan hak interpelasi dalam rapat paripurna.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB, Effendi Choirie, berharap usulan interpelasi sudah disampaikan kepada pimpinan DPR sebelum masa reses. Jika disetujui, Presiden harus menjelaskan kebijakannya terkait isu nuklir Iran. "Bila penjelasan Presiden tak memenuhi keinginan dewan, DPR bisa menolak. Kalau ditolak, ujungnya adalah *impeachment*." Pemerintah dinilai tidak mampu memanfaatkan diplomasi secara baik. "Kita anggap diplomasi gagal. Padahal, kesempatan pemerintah menolak resolusi itu ada," ujarnya.

Menurut Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB, KH Abdurrahman Wahid, hak interpelasi DPR bisa berbuah pemakzulan jika terbukti melanggar UUD 1945. Apalagi, politik luar negeri RI adalah bebas aktif. Ketua Fraksi PAN, Zulkifli Hasan, mendesak Presiden Yudhoyono memberi penjelasan yang memadai mengenai dukungan terhadap resolusi DK PBB nomor 1747. Larangan dan sanksi terhadap Iran adalah bentuk arogansi negara-negara adikuasa. "Keputusan RI mencerminkan sikap bermuka dua. Di satu sisi mendukung program nuklir, di sisi lain mendukung resolusi," kata dia.

Namun, Wapres Jusuf Kalla menegaskan, sikap RI sudah tepat. Wapres minta resolusi itu dibaca secara utuh. "Kalau baca isinya, teman-teman di DPR juga mungkin punya pendapat lain," kata Kalla. Menurut Wapres, resolusi itu tidak hanya bicara sanksi, tapi juga jadwal penyelesaian damai. Karena itu, Iran diberi waktu 60 hari melaksanakan isi resolusi.

Sumber:

http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=287727&kat_id=3

BERITA UTAMA
Kamis, 29 Maret 2007

Ulama akan Ajukan *Class Action*

'Itu memang hak DPR, tapi apa perlunya interpelasi?'

JAKARTA -- Tim Pembela Muslim (TPM), mewakili kalangan ulama seluruh Indonesia, akan mengajukan gugatan *class action* terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait dukungan resolusi DK PBB pada Iran.

Koordinator TPM, Mahendradatta, menganggap Presiden SBY telah melanggar prinsip politik bebas aktif yang termaktub dalam UUD 1945 dengan turut menyetujui resolusi. "Gugatan ini merupakan penegasan kalangan ulama bahwa mereka tak menyetujui langkah pemerintah yang mendukung resolusi sanksi bagi Iran," kata Mahendradatta.

Sebelum mendaftarkan gugatan *class action* ke PN Jakpus, pihaknya akan mendatangi pimpinan ormas Islam, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Ketua Presidium ICMI, Nanat Fatah Natsir, menyesalkan sikap RI yang mendukung penjatuhan sanksi ke Iran tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat maupun negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). "Akan lebih tepat jika pemerintah memilih sikap abstain," kata Nanat.

Sementara Komisi I dan pimpinan DPR dijadwalkan membacakan usulan interpelasi soal nuklir Iran dalam rapat paripurna hari ini (Kamis, 29/3). Kemarin, draf interpelasi serta dukungan berupa tanda tangan 132 anggota DPR disampaikan kepada Ketua DPR, Agung Laksono.

"Besok (hari ini) masih ada rapat paripurna. Saya harap usulan ini bisa diloloskan dan dibacakan untuk selanjutnya menjadi interpelasi dewan," kata Agung di Jakarta, Rabu (28/3).

Agung berharap pemerintah segera memberi respons atas usulan interpelasi itu. Interpelasi adalah niat baik, dan bukan bertujuan menjatuhkan Presiden. "Sehingga, akan lebih baik jika Presiden yang langsung memberi penjelasan ke rakyat melalui DPR, meski ada ketentuan bisa diwakilkan menteri," jelas dia.

Dukungan pengajuan hak interpelasi itu berasal dari sembilan fraksi, kecuali Fraksi Partai Demokrat. Salah satu pengusul hak interpelasi, Abdillah Toha dari Fraksi PAN, mengatakan, interpelasi jangan dianggap sebagai hal negatif. Hak bertanya itu justru memberi kesempatan bagi Presiden untuk memaparkan hal yang dinilai belum jelas.

Beberapa hal yang akan ditanyakan, misalnya, apa dasar pertimbangan pemerintah menyetujui resolusi DK PBB. "Apakah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Bukankah merupakan tindakan diskriminatif dan berstandar ganda," papar dia.

Ketua Fraksi PPP DPR, Endin AJ Soefihara, bertekad mengupayakan pengajuan hak interpelasi membuahkan hasil. "Sikap pemerintah itu telah menyakiti hati rakyat dan memperburuk citra Indonesia di mata dunia Islam," kata Endin.

Interpelasi oleh DPR dalam kasus Iran, menurut Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, merupakan penggunaan hak yang pertama kalinya digulirkan anggota dewan untuk kepentingan luar negeri atau internasional. "Interpelasi itu bagus, memang hak DPR untuk menanyakan persoalan tersebut," ujarnya.

Juru Bicara Presiden, Andi Mallarangeng, meminta DPR tak perlu mengajukan hak interpelasi. "Interpelasi adalah hak DPR, tapi pertanyaannya, apa perlunya," kata Andi.

(yus/eye/ann)

Sumber:

http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=287857&kat_id=3

BERITA UTAMA
Jumat, 30 Maret 2007

DPR Cecar Menlu Wirajuda

Dukungan terhadap resolusi dapat menambah daftar *reshuffle* menteri.

JAKARTA -- Surat usulan interpelasi nuklir Iran yang didukung 132 anggota dewan, telah diterima pimpinan DPR. Selanjutnya, hak interpelasi ini akan ditindaklanjuti Badan Musyawarah (Bamus) DPR, apakah bisa menjadi agenda sidang paripurna.

Menurut Ketua DPR, Agung Laksono, pemerintah tidak perlu khawatir terhadap rencana interpelasi ini karena bukan untuk menjatuhkan pemerintah. "Interpelasi merupakan hak bertanya, dan bukan hak angket," kata Agung di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (29/3).

Hak bertanya, sebelumnya juga pernah digulirkan DPR terkait maraknya penderita gizi buruk. "Dan saat itu direspons baik oleh pemerintah," jelas Agung. Interpelasi diajukan karena pemerintah berubah sikap terhadap program nuklir Iran.

"Sepertinya kita tak memercayai Iran mengembangkan nuklir untuk keperluan damai, seperti telah disampaikan langsung oleh Presiden Iran, Ahmadinejad, maupun ketua parlemen dan pejabat Iran lainnya yang berkunjung ke DPR," urai Agung. Padahal, Indonesia semestinya memosisikan diri sesuai amanat UUD 1945 yang menekankan politik luar negeri bebas aktif.

Namun, Ketua Fraksi PDIP DPR, Tjahjo Kumolo, mengingatkan, supaya tidak dicap plin-plan, DPR harus komitmen menjadikan agenda itu tak kandas di tengah jalan. "Kalau sudah dibacakan, kami minta pimpinan konsisten membawa usul hak interpelasi ini ke rapat bamus. Jangan sampai masyarakat kembali menilai DPR tidak konsisten," jelas dia.

Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, menambahkan, dalam konteks demokrasi, interpelasi merupakan salah satu hak yang dimiliki DPR, karena itu perlu dihargai. Meski demikian, dia menegaskan, hak tersebut harus dikelola dengan cara terhormat agar masyarakat tak apatis dan menimbulkan kesan main-main dengan hak itu. "Jangan hanya hangat di awal, tapi kemudian gembos dan tidak jelas."

Menurut Ketua DPP Partai Demokrat, Darwin Z Saleh, sikap RI menyetujui Resolusi DK PBB No 1747, sudah tepat. Jika tak menyetujui, RI tak diperkenankan turut menyusun rancangan resolusi. "Kalau tidak ikut menyusun, kita tidak bisa melunakkan rancangan itu," jelasnya.

Menurut Menlu, Nur Hassan Wirajuda, resolusi itu tak hanya berisikan sanksi, tapi juga berbicara mengenai upaya damai. Bahkan, dalam lampiran II resolusi terdapat insentif-insentif untuk Iran. "Kenapa kita harus kebakaran jenggot hanya mendengar kata sanksi. Dalam diplomasi masih ada yang terbuka. Dunia masih terus bergulir," kata Hassan.

Mantan menlu, Ali Alatas, melihat posisi Indonesia di DK PBB memang sulit. Semua negara, baik anggota tetap maupun tidak tetap DK, sudah menyetujui resolusi untuk Iran. "Masak kita *break* konsensus," kata Ali.

(eye/djo/osa/yus/dia)

Sumber:

http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=287958&kat_id=3



Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Jalan Sekeloa Indah No. 1, Sekeloa Indah, Kecamatan Sekeloa Indah, Kabupaten Raniry, Aceh
Telp. (0651) 8210000, Fax. (0651) 8210001, Email: info@uin-ar-raniry.ac.id

Minggu, 01 April 2007

PPP akan Teruskan Interpelasi

Presiden berharap masyarakat pahami sikap pemerintah.

JAKARTA -- DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bertekad untuk meneruskan interpelasi terkait kebijakan pemerintah terhadap isu nuklir Iran. "Kami yakin, interpelasi itu bisa terus berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Chozin Chumaedy, di Jakarta, Sabtu (31/3).

Dalam konferensi pers di Kantor DPP PPP itu Chozin juga menyatakan DPP PPP tidak pernah menginstruksikan anggota Fraksi PPP untuk menarik dukungan terhadap usulan interpelasi tentang sikap pemerintah yang menyetujui resolusi DK PBB nomor 1747.

"Interpelasi merupakan hak konstitusional anggota DPR yang dijamin UUD 1945 dan diatur mekanismenya dalam peraturan Tatib DPR," kata Chozin yang didampingi antara lain oleh Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz dan Wakil Sekjen Teuku Taufiqulhadi.

Karena itu, tambahnya, DPP PPP memberi keleluasaan kepada anggota-anggotanya menggunakan hak interpelasi atas permasalahan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional anggota kepada rakyat yang memerlukan keterangan pemerintah atas persoalan tersebut.

Menurut Chozin, PPP tidak akan main-main dalam menggunakan hak interpelasi ini. "Tidak ada *bargain* politik. Justru dengan interpelasi akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjelaskan kebijakan yang telah diambil terkait resolusi 1747 tersebut," katanya.

Soal resolusi PBB itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap agar masyarakat dapat memahami kebijakan yang telah diambil pemerintah terkait isu nuklir Iran. "Indonesia terus menyerukan dilakukannya perlucutan senjata dan juga pencegahan pengembangan senjata nuklir baru bagi semua dan bukan hanya bagi Iran," katanya pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/3) malam.

Menurut Presiden, jika kita mengkhawatirkan keamanan di Timur Tengah dan Asia dari ancaman senjata nuklir, maka seruan tersebut berlaku bagi semua negara yang memiliki kemampuan untuk itu. "Proses penyelesaian krisis nuklir Iran belum selesai. Kami terus berupaya mendorong dan mengajak semua pihak bersikap adil dan mengedepankan dialog dan perundingan," katanya.

Sanksi, tambah Presiden, bukanlah tujuan utama. Sanksi harus bersifat persuasif agar suatu negara mengubah posisi melalui jalur perundingan. "Saya harap rakyat Indonesia dapat memahami kebijakan pemerintah terhadap nuklir Iran," tegasnya.

Presiden menegaskan sikap pemerintah tetap konsisten terkait isu nuklir Iran.

"Menyangkut isu nuklir Iran yang kini terus jadi ajang perdebatan di tingkat PBB dan

forum internasional lainnya, posisi dan sikap Indonesia tetap konsisten, yakni agar permasalahan nuklir Iran diselesaikan secara damai melalui saluran diplomasi dan perundingan. Indonesia menolak setiap penggunaan kekuatan militer untuk penyelesaian masalah nuklir Iran," tegas Presiden.

Menurut Presiden, Indonesia mendukung penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai. "Setiap negara berhak melakukannya termasuk Iran. Jika terdapat silang pendapat, apakah pengembangan teknologi nuklir itu dilakukan dengan tujuan damai atau tujuan militer, maka penilaiannya kita kembalikan kepada Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA)," katanya.

Menurut Presiden, badan itulah yang memiliki parameter dan standar serta kompetensi untuk memberikan penilaian. Posisi, sikap dan usulan Indonesia ini telah disampaikan dalam berbagai kesempatan termasuk kepada Pemimpin Iran, Presiden Rusia, Presiden Amerika Serikat dan para pemimpin dunia Islam lainnya.

"Meski situasi makin rumit dan tegang, Indonesia masih berupaya mengajak kepada negara sahabat untuk meredakan ketegangan dan mencegah terjadinya konflik bersenjata baru di Timur Tengah. Hal ini disampaikan juga dalam pertemuan puncak Liga Arab yang diwakili Wapres Jusuf Kalla," kata Presiden. "Indonesia ingin Timur Tengah, Asia, dan bahkan seluruh dunia, terhindar dari perang terbuka apalagi disertai senjata nuklir."

Di tempat yang sama, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra mengatakan pada prinsipnya interpelasi merupakan hak DPR. Namun, tambah Yusril, dalam hal ini, berbagai langkah intensif telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Di berharap, setelah mendapat penjelasan itu akan ada perubahan pandangan di kalangan anggota DPR.

(osa)

Sumber:

http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=288119&kat_id=3

Berita Utama

Senin, 02 April 2007

Pemerintah Jawab dengan Tiga Opsi

Semua sepakat kawasan Timteng harus bebas dari perlombaan senjata nuklir.

MAKASSAR -- Wapres Jusuf Kalla tak terlalu merisaukan usulan interpelasi yang diajukan DPR terhadap keputusan pemerintah mendukung resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB atas program nuklir Iran. Bagi Wapres, penyelesaian interpelasi sebenarnya sederhana.

Dan pemerintah akan segera menjawab semua pertanyaan yang diajukan anggota DPR itu. Sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, ia telah menjelaskan masalah ini kepada ketua fraksi Partai Golkar di DPR. "Partai Golkar menawarkan tiga opsi, yakni pertama, pemerintah bisa menjelaskan ke komisi I. Kedua, pemerintah memberikan penjelasan tertulis ke DPR. Dan ketiga jika interpelasi ini diteruskan, pemerintah bisa jelaskan di sidang paripurna," kata Kalla, di Makasar, Ahad (31/3).

Wapres menganggap keputusan pemerintah sudah tepat mengingat tak ada satu pun negara Islam baik di Timur Tengah (Timteng) maupun di luar kawasan itu yang mempersoalkannya. Bahkan saat KTT Liga Arab, tak satu pun kepala pemerintahan yang menyinggung masalah itu dalam pidatonya, kecuali Indonesia. "Interpelasi itu kan cuma pertanyaan, boleh dijawab di komisi atau pertemuan-pertemuan biasa," ujarnya.

Sebelum keputusan diambil, ungkap Kalla, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebenarnya telah berbicara melalui telepon dengan Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad. Presiden SBY meminta agar pemimpin Iran itu bersedia mengalah selangkah untuk menghindari resolusi. Namun, permintaan itu tidak digubris Ahmadinejad.

Padahal, bila Iran menerima permintaan itu, dunia internasional akan membantunya mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Bahkan, ia mengungkapkan, saat KTT Liga Arab, Menlu Iran hanya menganggap resolusi itu sebagai simbolik belaka.

"Kita selalu salah persepsi, Iran dan orang lain saja tidak terlalu mempermasalahkan resolusi itu, kita di sini malah sibuk sendiri," sindirnya. Beberapa kali Wapres mengingatkan tak satu pun negara Islam yang marah atas keluarnya resolusi 1747. Sebaliknya, semua justru sepakat kawasan Timteng harus bebas dari perlombaan senjata nuklir, termasuk dari ulah Israel. "Negara-negara Timteng tak ada yang keberatan dengan resolusi itu, karena ini justru ada jalan untuk damai," kata Kalla.

Wapres menjelaskan sanksi yang dimuat dalam resolusi itu sebenarnya hanya ditujukan kepada individu atau perusahaan termasuk perusahaan asing yang terkait dengan program nuklir. Sedangkan negara Iran sendiri tak dikenai satu sanksi pun oleh PBB. djo ()

Sumber:

http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=288129&kat_id=3

BERITA UTAMA

Selasa, 03 April 2007

Presiden Diminta Menjelaskan Langsung

:Interpelasi ini untuk memberikan pendidikan politik kepada publik.

JAKARTA -- Pengajuan usulan interpelasi DPR atas sikap pemerintah terhadap resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB tentang nuklir Iran, bukan untuk menjatuhkan pemerintah. Usulan interpelasi itu perlu dilihat sebagai cara berdemokrasi yang bertanggung jawab.

Dengan alasan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipandang perlu memberikan penjelasan secara langsung di depan anggota DPR. "Interpelasi harus dilihat sebagai cara berdemokrasi secara langsung dan lebih bertanggung jawab dari seorang kepala negara," kata anggota Komisi I DPR, Sabam Sirait, di Jakarta, Senin (2/4).

Usulan interpelasi yang sudah ditandatangani sekitar 280 anggota dewan, menurut Sabam, semestinya ditanggapi serius pemerintah. "Lalu, apa salahnya jika Presiden datang langsung dan berdialog dengan dewan. Untuk apa ada lembaga paripurna bila hanya sebagai pajangan," kata Sabam menegaskan.

Setelah era Orde Baru, katanya, ada kemajuan dalam berdemokrasi. Jika dulu DPR dianggap hanya 'tukang stempel', apakah sekarang akan mundur kembali dan mendapatkan cap itu. Terlebih, dunia internasional telah melihat perbedaan sikap antara pemerintah dan parlemen.

Menurut Wakil Ketua MPR, AM Fatwa, interpelasi harus dilihat sebagai kesempatan pemerintah untuk menjelaskan secara komprehensif sikap ikut menyetujui Resolusi DK PBB nomor 1747 itu. Pemerintah diminta tak perlu khawatir akan dipolitisasi, misalkan untuk menjatuhkan pemerintah (*impeachment*).

"Karena, jika sudah menyangkut politik luar negeri, pemerintah tidak bisa mengabaikan suara rakyat melalui parlemen," tegas Fatwa. Oleh sebab itu, Fatwa berharap Presiden SBY yang langsung memberikan penjelasan di hadapan dewan.

Dia menilai, akan dinilai kurang terhormat jika Menlu Nur Hassan Wirajuda yang mewakili Presiden menjelaskan hal tersebut. "Menlu sudah memberi pernyataan di Komisi I DPR, juga lobi-lobi di luar. Itu sudah cukup. Jadi, harus Presiden sendiri yang menjelaskan."

Semua pihak, ujar Fatwa, diminta melihat usulan interpelasi ini dalam perspektif pendidikan politik bagi publik. Dalam konteks ini, langkah dewan semestinya ditanggapi pemerintah biasa-biasa saja. "Kalau kemudian ada anggota DPR yang menarik dukungan, saya kira itu tidak memberikan pendidikan politik yang baik."

Juru bicara Deplu, Desra Percaya, mengatakan ada kesenjangan informasi terkait sikap pemerintah dan masyarakat dalam isu nuklir Iran. Kesenjangan itu terwujud pada reaksi keras yang ditunjukkan masyarakat. "Apa yang terjadi di New York

memang sangat cepat, dan mungkin sikap pemerintah atas isu nuklir Iran pada waktu-waktu sebelumnya kurang tersampaikan ke masyarakat," kata Desra saat berdiskusi dengan redaksi *Republika*, kemarin.

Selama ini, kata Desra, pemerintah berusaha bersikap sesuai kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Bahkan, sejak isu nuklir Iran mengemuka pada 2003, pemerintah telah menyatakan dukungan atas hak Iran mengembangkan teknologi nuklir guna kepentingan damai, karena hak itu melekat pada negara penanda tangan kesepakatan nonproliferasi (NPT).

Di saat yang sama, pemerintah selalu meminta Iran bersikap terbuka, lebih bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk menepis kecurigaan Amerika Serikat dan Uni Eropa, dan menghentikan sementara aktivitas pengembangan nuklir untuk membangun kepercayaan pihak lain.

Indonesia, kata Desra, akan menjadi negara pertama penentang jika Iran mengalihkan keuntungan damai atas program nuklir untuk kepentingan militer. Begitu pula jika hak Iran dibelenggu, Indonesia akan menjadi negara pertama yang membela Iran.

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang, MS Kaban, memandang penjelasan pemerintah soal persetujuan terhadap resolusi PBB sudah memadai. "Saya kira hanya butuh penjelasan. Kalau yang dijelaskan itu sudah mantap, saya kira tidak perlu (interpelasi)," kata Kaban. yus/lan/djo

()

Sumber:

http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=288244&kat_id=3

BERITA UTAMA

Rabu, 04 April 2007

Penolakan Resolusi Iran di Bogor Rusuh

Mahasiswa Makasar unjuk rasa tolak resolusi PBB sembari bakar ban.

BOGOR -- Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Cabang Bogor di depan Istana Bogor, Selasa (3/4), berakhir dengan bentrok fisik. Delapan demonstran ditangkap aparat kepolisian.

Aksi unjuk rasa menentang keputusan resolusi Dewan Keamanan PBB No 1747 atas sanksi kepada Iran tersebut diawali dengan orasi di Tugu Kujang. Para demonstran meminta kepada peserta pertemuan para alim ulama dunia di Istana Bogor untuk menentang resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut. Usai berorasi, para mahasiswa itu melakukan jalan kaki menuju pintu gerbang Istana Bogor di Jalan Juanda yang lokasinya tepat di depan markas Detasemen Polisi Militer.

Namun aksi mereka mendapat hadangan puluhan aparat kepolisian yang telah berjaga-jaga. Perang mulut akhirnya tidak terhindarkan dan berlanjut dengan saling dorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian. Sebagian besar mahasiswa yang telah berhasil menerobos hadangan aparat, mencoba memasuki pintu Istana Bogor.

Usaha itu pun akhirnya gagal sebab aparat yang telah bersiaga kemudian menghalaunya. Dikomandoi langsung Kapolwil Bogor, Kombes Polisi Sukrawardi Dahlan, aparat langsung menerjang kerumunan mahasiswa yang mencoba menyegel pintu Istana Bogor. Beberapa mahasiswa sempat terkena pukulan dan tendangan aparat. Kerumunan demonstrasi pun kocar-kacir.

Meski mendapat hadangan dan blokade, para mahasiswa ternyata tidak kehabisan akal. Mereka kemudian mengalihkan sasaran dengan berlari menuju pintu II Istana Bogor yang berada tepat di depan halaman kantor Balaikota Bogor. Namun lagi-lagi petugas pun tidak mau kecolongan. Mereka segera menghalau para demonstran itu. Bahkan, kemudian ada delapan orang mahasiswa ditangkap petugas.

Semula, para mahasiswa tersebut berusaha menolak dimasukkan ke dalam mobil polisi. Mereka pun mencoba memberontak dan berusaha melepaskan diri dari genggaman tangan aparat. Namun upaya itu sia-sia. Aparat secara paksa memasukkan mereka ke dalam mobil dan selanjutnya digiring menuju Mapolwil Bogor. Kapolwil Bogor Kombes Polisi, Sukrawardi Dahlan, mengatakan, penangkapan tersebut terpaksa dilakukan karena aksi ratusan mahasiswa tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak kepolisian.

Bakar ban bekas

Di wilayah lain, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) dan Universitas 45 Makassar juga menggelar aksi mengecam sikap pemerintah yang mendukung resolusi tersebut. Mereka menggelar aksi unjuk rasanya di depan kampusnya masing-masing.

Mahasiswa UIN, dalam aksinya menggelar orasi di depan kampusnya di Jl Sultan Alauddin sembari membakar ban bekas. Aksi mereka sempat memacetkan jalanan yang merupakan jalan penghubung antara Makassar dan kabupaten Gowa. Aksi serupa juga dilakukan mahasiswa 45. Namun puluhan mahasiswa 45 usai melakukan orasi lebih memilih mendatangi pusat perbelanjaan Ramayana di Jl AP Pettarani.

Para mahasiswa kemudian mendesak pihak manajemen Ramayana untuk mengeluarkan produk yang merupakan simbol Amerika sebagai wujud kebencian pada negeri Paman Sam tersebut. Permintaan itu dipenuhi. Seorang petugas tempat belanja tersebut kemudian membawakan produk berupa dua kaleng minuman ringan Coca Cola. Namun para mahasiswa menolaknya dengan alasan produk tersebut sudah bukan produk asli Amerika lagi.

Akhirnya, produk yang mereka terima sebagai simbol Amerika adalah kotak makanan siap saji California Fried Chicken (CFC). Di depan *store manager* Ramayana, Sammy, kotak tersebut kemudian dibakar oleh para mahasiswa.

Sebelum pembakaran mereka lakukan, koordinator aksi, Amal Sakti, membacakan tuntutan mereka diantaranya mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mencabut dukungan terhadap resolusi dewan keamanan PBB No 1747 itu. Mereka juga mendesak pemerintahan SBY untuk memutuskan hubungan luar negeri dengan Amerika Serikat dan sekutunya. "Selain itu, kami juga mendesak agar Presiden SBY agar mendukung teknologi nuklir Iran serta menghimbau masyarakat luas untuk memboikot produk Amerika Serikat," katanya. ade/ina

()

Sumber:

http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=288396&kat_id=3

BERITA

Minggu, 08 April 2007

'Pemerintah Indonesia Buntut Amerika Serikat'

Wajar bila DPR menggunakan isu resolusi PBB soal ukir Iran untuk menyerang pemerintah.

BANDUNG -- Kemandirian bangsa Indonesia mendekati titik nadir. Hal ini terlihat dari sikap pemerintah Indonesia yang turut mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB No 1747 untuk pemberian sanksi baru terhadap Iran.

"Indonesia telah menjadi buntutnya Amerika Serikat," kata mantan Ketua MPR, M Amien Rais saat berbicara dalam seminar nasional 'Quo Vadis Kemandirian Bangsa Indonesia Studi Kasus Iran dan Venezuela', di Gedung Sasana Budaya Ganesha ITB, Sabtu (7/4).

Dikatakan Amien, sikap pemerintah Indonesia yang sangat patuh terhadap Amerika Serikat ini sudah terlihat sejak lama. Bahkan, kata dia, pada saat kedatangan Presiden Amerika, George Bush, beberapa waktu lalu ke Istana Bogor memperlihatkan sekali kalau Indonesia merupakan boneka Amerika Serikat (AS).

Senada dengan Amien, Ketua Dewan Syuro Ikatan Jamaah Ahlul Baik (Ijabi), Jalalludin Rahmat, menilai tindakan pemerintah Indonesia mendukung resolusi DK PBB No 1747 berarti membenarkan adanya kebohongan besar yang dilancarkan AS. Dikatakan dia, tudingan bahwa Iran tidak transparan dalam proses pengayaan uranium merupakan kebohongan yang nyata dibuatnya.

Menurut Jalalludin, Iran telah mempersilakan Badan Atom Internasional untuk melakukan inspeksi terhadap seluruh reaktor nuklirnya. Bahkan, Badan Atom Internasional telah mengeluarkan hasil inspeksi itu dan menyatakan bahwa Iran masih belum mampu membuat senjata nuklir.

"Iran baru bisa mengembangkan 3,5 persen dari pengayaan uraniumnya dari standar 93 persen pengembangan teknologi nuklir jika akan dijadikan senjata nuklir. Fakta ini jelas bukan lagi kebohongan publik, tapi *global lied* (kebohongan besar)," katanya.

Sementara itu, di luar gedung Sabuga ITB, beberapa mahasiswa yang menamakan dirinya Forum Anti Israel Zionis (FAIZ) menggelar aksi demonstrasi menentang resolusi DK PBB 1747. Para mahasiswa ini juga menggalang tanda tangan dari para peserta seminar sebagai bentuk dukungan penolakan resolusi DK PBB tersebut.

Amien Rais juga membubuhkan tanda tangan dalam kain putih yang digelar di luar gedung Sabuga ITB tersebut. "Tanda tangan ini merupakan bentuk dukungan atas penolakan resolusi DK PBB," tegas Koordinator Lapangan FAIZ, Mohammad Reza.

Kain putih berisikan ratusan tanda tangan ini, kata Reza, nantinya akan dipasang di pagar DPRD Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, kata dia, kain putih ini juga akan dipasang di pagar DPR RI.

Suara rakyat

Menyoroti soal polemik resolusi PBB mengenai nuklir Iran, pengamat politik LIPI, Indria Samego, mengatakan isu tersebut kini memang sudah menjadi ajang rekayasa politik di DPR. Dan ini sangat wajar karena mereka memang wakil rakyat.

"DPR memanfaatkannya sebagai ajang menaikkan citra karena selama ini sering dituduh tidak peduli terhadap suara rakyat. Dan SBY sendiri mau tidak mau dia harus selalu bekerja sama dengan DPR. Persoalan resolusi PBB soal nuklir Iran ini kini memang telah menjadi bahan rekayasa politik di Senayan untuk melakukan serangan terhadap pemerintah," katanya.

(rfa/ant)

Sumber:

http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=288746&kat_id=375



Indonesia tak Bebas Aktif Lagi

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengubur prinsip politik bebas aktif Indonesia di kancah internasional. Ini ditandai dengan dukungan pemerintah terhadap aspirasi Amerika Serikat (AS) dan sekutunya yang didesakkan melalui Resolusi Nomor 1747 Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang perluasan sanksi terhadap program nuklir Iran.

"Sesungguhnya, kita ini tidak lagi bebas aktif. Karena, kita ini ada di bawah bayang-bayang Washington (AS)," kata mantan ketua majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Amien Rais, ketika menanggapi soal dukungan pemerintah atas resolusi tersebut dalam dialog interaktif di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan, Jakarta, Jumat (25/5). Amien teringat sikap 'tebar pesona' Yudhoyono ketika menerima kunjungan Presiden Iran Ahmadinejad. "Pakai dipeluk-peluk. Dikatakan, Indonesia mendukung nuklir Iran untuk perdamaian. Tapi, ada *blackbox*. Tiba-tiba, kita balik kanan, mendukung AS lewat Resolusi PBB itu. Jadi, ada apa ini?" ujarnya.

Mengenai langkah DPR menggunakan hak meminta penjelasan dan bertanya (interpelasi) atas dukungan pemerintah terhadap resolusi PBB itu, pada awalnya, Amin tidak yakin dilakukan dengan sungguh-sungguh. Namun ternyata, interpelasi itu pun disepati mayoritas fraksi di Senayan. "Saya pernah berkelakar, kalau interpelasi jadi, saya akan potong ayam dua ekor. Jadi, sebagai orang yang pernah bernazar potong ayam, insya Allah, saya akan potong ayam," kata Amien.

Melukai reformasi

Mantan ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menilai, tindakan pemerintah Yudhoyono mengecewakan dalam mengisi agenda reformasi. Pada awalnya, reformasi ini diharapkan terjadi pemulihan ekonomi, penegakan hukum, keadilan sosial, dan kemandirian bangsa. Ternyata, yang terjadi tidaklah demikian.

"Yang terjadi, tadinya ke utara, malah ke selatan. Inilah yang mengecewakan. Dalam satu windu ini, kita jalan di tempat, bahkan mundur. Kita tak salahkan siapa-siapa. Mari kita lakukan reorientasi dan reevaluasi. Yang jadi *power holder* saat ini, dari sanalah kalau kita mau perbaikan," cetus Amien.

Sehari sebelumnya, rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR sepakat menjadwalkan pemanggilan Presiden Yudhoyono pada 5 Juni 2007 untuk menjawab interpelasi. Wakil Ketua DPR, Zaenal Ma'arif, mengungkapkan, dalam rapat Bamus yang dipimpinnya sempat diperdebatkan soal keharusan Presiden langsung yang memberi jawaban. Namun, mengacu pada Tata Tertib (Tatib) DPR, akhirnya diputuskan untuk membuat surat pemanggilan seperti biasa tanpa ada penekanan harus Presiden yang datang. Kendati demikian, fraksi-fraksi pendukung interpelasi meminta Presiden bersikap jantan dan dewasa dengan mau mempertanggungjawabkan langsung sikap pro-Washington-nya itu. n wed ()

Sumber:

http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=294470&kat_id=3

Penjelasan pemerintah

Dalam jawaban interpelasi yang disampaikan Widodo AS, pemerintah menyatakan dukungan terhadap resolusi PBB itu diberikan setelah memperhatikan dan membicarakannya dengan para anggota Dewan Keamanan tak tetap lainnya, termasuk dengan beberapa negara di Timur Tengah.

"Pemerintah konsisten menjalankan kebijakan politik bebas dan aktif itu dan tetap ikut berupaya menciptakan perdamaian dunia. Dalam resolusi itu, ada konsensus untuk menciptakan kawasan bebas nuklir di Timur Tengah, hak bagi semua negara untuk mengembangkan nuklir demi perdamaian, serta negara maju melucuti senjata nuklirnya," kata Widodo. wed

()

Sumber:

http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=299677&kat_id=43



POLITIK
Rabu, 11 Juli 2007

Rapat Interpelasi Iran Tanpa Hasil

JAKARTA -- Sidang Paripurna DPR mengenai interpelasi soal dukungan pemerintah atas Resolusi DK PBB nomor 1747 tentang pengayaan nuklir Iran tak menghasilkan keputusan penerimaan atau penolakan dari para anggota dewan. Meski begitu, masih terbuka peluang bagi anggota dewan yang menolak jawaban pemerintah untuk hak menyatakan pendapat ke pimpinan DPR.

"Tak ada masalah penolakan dan penerimaan dalam hasil interpelasi ini. Kalau pun ada yang keberatan, maka gunakan pasal 175 Tata Tertib DPR untuk menyatakan pendapatnya ke pimpinan DPR," kata Wakil Ketua DPR, Zaenal Ma'arif, usai memimpin sidang paripurna interpelasi Iran Jakarta, Selasa (10/7).

Zaenal menambahkan, dalam menyampaikan hak menyatakan pendapat dari anggota dewan itu, pihaknya berharap bisa disampaikan sebelum tanggal 20 Juli 2007. Pasalnya, tanggal tersebut merupakan batas waktu menjelang masa reses DPR.

Dalam sidang paripurna soal interpelasi Iran itu, hampir semua fraksi menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, mereka berharap, dengan rapat konsultasi yang digelar pada 3 Juli 2007, bisa membuat Presiden memahami keinginan sebagian besar anggota dewan agar dia hadir di interpelasi.

"Presiden lebih menghormati dan hanya mau bicara ke pimpinan DPR dan fraksi, padahal, DPR bukan hanya pimpinan itu saja. Apalagi, interpelasi ini hak institusi," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Effendy Choirie. Sikap Presiden itu juga membuat penggagas interpelasi Iran, Abdillah Toha dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), memperkuat niatnya untuk mengajukan perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara (SKLN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita akan menciptakan tradisi baru untuk interpelasi yang akan datang sehingga setiap interpelasi yang bertanggung jawab itu presiden." Niat Abdillah ini juga didukung oleh beberapa Permadi dari Fraksi PDI Perjuangan. Menurutnya, masih banyak interpelasi lain yang akan memaksa presiden untuk datang. "Pak Abdillah akan membawa masalah ini ke MK. Saya dukung dia."

Berbeda dengan sikap keras yang disampaikan sebelumnya, Anggota Fraksi Golkar DPR, Yuddy Chrisnandi, menyatakan, biarkan interpelasi ini berlangsung dan penilaiannya diserahkan ke masyarakat. Sidang Paripurna itu dihadiri oleh 227 dari 549 orang anggota DPR. Dalam sidang itu, hadir beberapa menteri mewakili Presiden. Mereka antara lain, Mensesneg Hatta Rajasa, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menhan Juwono Sudharsono, Menlu Hassan Wirajuda, Menristek Kusmayanto Kadiman, Menko Polhukham Widodo AS, dan Menkumham Andi Matalatta.



LAMPIRAN 3

LEMBAR PENILAIAN CODING SHEET

LEMBAR PENILAIAN CODING SHEET
UNIT ANALISIS SIFAT FAKTA
DI SURAT KABAR HARIAN KOMPAS

NO	JUDUL BERITA	PENELITI	CODER 1	CODER 2
1	Sanksi Keras Bisa Lahirkan Masalah	B	B	B
2	Usulan Perubahan RI Diterima	B	B	B
3	Interpelasi Resolusi 1747 Bergulir Cepat	A	A	A
4	Iran alihkan Devisa Dollar AS	B	B	B
5	Wapres Berharap Iran Bersedia Berkompromi	B	B	B
6	Lobi Dharmawangsa Tak Bisa Bendung Interpelasi	A	A	A
7	Komisi I DPR Kecewa	B	B	B
8	Golkar Siapkan Tiga Opsi Interpelasi	B	A	A
9	Pengajuan Hak Interpelasi Hanya untuk Minta Penjelasan	B	B	B
10	OKI Memahami Sikap Indonesia soal Iran	B	B	B
11	Kemandirian RI Digugat	B	B	B
Titik kesepakatan			10	10

Ketr: A=Fakta Sosiologis
B=Fakta Psikologis

LEMBAR PENILAIAN CODING SHEET
UNIT ANALISIS SIFAT FAKTA
DI SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA

NO	JUDUL BERITA	PENELITI	CODER 1	CODER 2
1	DK PBB Jatuhkan Sanksi untuk Iran	A	A	A
2	DPR Galang Interpelasi Nuklir Iran	B	B	B
3	Dukungan Interpelasi Menguat	A	A	A
4	Ulama akan Ajukan <i>Class Action</i>	B	B	A
5	DPR Cengar Menlu Wirajuda	B	B	B
6	PPP akan Teruskan Interpelasi	B	B	B
7	Pemerintah Jawab dengan Tiga Opsi	A	B	A
8	Presiden Diminta Menjelaskan Langsung	B	B	B
9	Penolakan Resolusi Iran di Bogor Rusuh	A	A	A
10	Pemerintah Indonesia Buntut Amerika Serikat	B	B	B
11	Indonesia Tak Bebas Aktif Lagi	B	B	B
12	Interpelasi Iran Tanpa Hasil	A	A	B
Titik kesepakatan			11	10

Ketr: A=Fakta Sosiologis
B=Fakta Psikologis

$$M_1 = 21$$

$$M_2 = 20$$

LEMBAR PENILAIAN CODING SHEET
UNIT ANALISIS KELENGKAPAN 5W & 1H
KATEGORI WHAT
DI SURAT KABAR HARIAN KOMPAS

NO	JUDUL BERITA	PENELITI	CODER 1	CODER 2
1	Sanksi Keras Bisa Lahirkan Masalah	A	A	A
2	Usulan Perubahan RI Diterima	A	A	A
3	Interpelasi Resolusi 1747 Bergulir Cepat	A	A	A
4	Iran alihkan Devisa Dollar AS	A	A	A
5	Wapres Berharap Iran Bersedia Berkompromi	A	A	A
6	Lobi Dharmawangsa Tak Bisa Bendung Interpelasi	A	A	A
7	Komisi I DPR Kecewa	A	A	A
8	Golkar Siapkan Tiga Opsi Interpelasi	A	A	A
9	Pengajuan Hak Interpelasi Hanya untuk Minta Penjelasan	A	A	A
10	OKI Memahami Sikap Indonesia soal Iran	A	A	A
11	Kemandirian RI Digugat	A	A	A
Titik kesepakatan			11	11

Ketr: A=Ada
B=Tidak ada

LEMBAR PENILAIAN CODING SHEET
UNIT ANALISIS KELENGKAPAN 5W & 1H
KATEGORI WHAT
DI SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA

NO	JUDUL BERITA	PENELITI	CODER 1	CODER 2
1	DK PBB Jatuhkan Sanksi untuk Iran	A	A	A
2	DPR Galang Interpelasi Nuklir Iran	A	A	A
3	Dukungan Interpelasi Menguat	A	A	A
4	Ulama akan Ajukan <i>Class Action</i>	A	A	A
5	DPR Cengar Menlu Wirajuda	A	A	A
6	PPP akan Teruskan Interpelasi	A	A	A
7	Pemerintah Jawab dengan Tiga Opsi	A	A	A
8	Presiden Diminta Menjelaskan Langsung	A	A	A
9	Penolakan Resolusi Iran di Bogor Rusuh	A	A	A
10	Pemerintah Indonesia Buntut Amerika Serikat	A	A	A
11	Indonesia Tak Bebas Aktif Lagi	A	A	A
12	Interpelasi Iran Tanpa Hasil	A	A	A
Titik kesepakatan			12	12

Ketr: A=Ada
B=Tidak ada

LEMBAR PENILAIAN CODING SHEET
UNIT ANALISIS KELENGKAPAN 5W & 1H
KATEGORI WHO
DI SURAT KABAR HARIAN KOMPAS

NO	JUDUL BERITA	PENELITI	CODER 1	CODER 2
1	Sanksi Keras Bisa Lahirkan Masalah	A	A	A
2	Usulan Perubahan RI Diterima	A	A	A
3	Interpelasi Resolusi 1747 Bergulir Cepat	A	A	A
4	Iran alihkan Devisa Dollar AS	A	A	A
5	Wapres Berharap Iran Bersedia Berkompromi	A	A	A
6	Lobi Dharmawangsa Tak Bisa Bendung Interpelasi	A	A	A
7	Komisi I DPR Kecewa	A	A	A
8	Golkar Siapkan Tiga Opsi Interpelasi	A	A	A
9	Pengajuan Hak Interpelasi Hanya untuk Minta Penjelasan	A	A	A
10	OKI Memahami Sikap Indonesia soal Iran	A	A	A
11	Kemandirian RI Digugat	A	A	A
Titik kesepakatan			11	11

Ketr: A=Ada
B=Tidak ada

LEMBAR PENILAIAN CODING SHEET
UNIT ANALISIS KELENGKAPAN 5W & 1H
KATEGORI WHO
DI SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA

NO	JUDUL BERITA	PENELITI	CODER 1	CODER 2
1	DK PBB Jatuhkan Sanksi untuk Iran	A	A	A
2	DPR Galang Interpelasi Nuklir Iran	A	A	A
3	Dukungan Interpelasi Menguat	A	A	A
4	Ulama akan Ajukan <i>Class Action</i>	A	A	A
5	DPR Cengar Menlu Wirajuda	A	A	A
6	PPP akan Teruskan Interpelasi	A	A	A
7	Pemerintah Jawab dengan Tiga Opsi	A	A	A
8	Presiden Diminta Menjelaskan Langsung	A	A	A
9	Penolakan Resolusi Iran di Bogor Rusuh	A	A	A
10	Pemerintah Indonesia Buntut Amerika Serikat	A	A	A
11	Indonesia Tak Bebas Aktif Lagi	A	A	A
12	Interpelasi Iran Tanpa Hasil	A	A	A
Titik kesepakatan			12	12

Ketr: A=Ada
B=Tidak ada

LEMBAR PENILAIAN CODING SHEET
UNIT ANALISIS KELENGKAPAN 5W & 1H
KATEGORI WHY
DI SURAT KABAR HARIAN KOMPAS

NO	JUDUL BERITA	PENELITI	CODER 1	CODER 2
1	Sanksi Keras Bisa Lahirkan Masalah	A	A	A
2	Usulan Perubahan RI Diterima	A	A	A
3	Interpelasi Resolusi 1747 Bergulir Cepat	A	A	A
4	Iran alihkan Devisa Dollar AS	A	A	A
5	Wapres Berharap Iran Bersedia Berkompromi	B	B	A
6	Lobi Dharmawangsa Tak Bisa Bendung Interpelasi	B	B	B
7	Komisi I DPR Kecewa	A	A	A
8	Golkar Siapkan Tiga Opsi Interpelasi	A	A	A
9	Pengajuan Hak Interpelasi Hanya untuk Minta Penjelasan	A	A	A
10	OKI Memahami Sikap Indonesia soal Iran	A	A	A
11	Kemandirian RI Digugat	A	A	A
Titik kesepakatan			11	10

Ketr: A=Ada
B=Tidak ada

LEMBAR PENILAIAN CODING SHEET
UNIT ANALISIS KELENGKAPAN 5W & 1H
KATEGORI WHY
DI SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA

NO	JUDUL BERITA	PENELITI	CODER 1	CODER 2
1	DK PBB Jatuhkan Sanksi untuk Iran	A	A	A
2	DPR Galang Interpelasi Nuklir Iran	A	A	A
3	Dukungan Interpelasi Menguat	A	A	B
4	Ulama akan Ajukan <i>Class Action</i>	A	A	A
5	DPR Cekar Menlu Wirajuda	B	A	B
6	PPP akan Teruskan Interpelasi	A	B	A
7	Pemerintah Jawab dengan Tiga Opsi	B	B	B
8	Presiden Diminta Menjelaskan Langsung	A	A	A
9	Penolakan Resolusi Iran di Bogor Rusuh	A	A	A
10	Pemerintah Indonesia Buntut Amerika Serikat	A	A	A
11	Indonesia Tak Bebas Aktif Lagi	A	A	A
12	Interpelasi Iran Tanpa Hasil	A	A	B
Titik kesepakatan			10	10

Ketr: A=Ada
B=Tidak ada

LEMBAR PENILAIAN CODING SHEET
UNIT ANALISIS KELENGKAPAN 5W & 1H
KATEGORI WHERE
DI SURAT KABAR HARIAN KOMPAS

NO	JUDUL BERITA	PENELITI	CODER 1	CODER 2
1	Sanksi Keras Bisa Lahirkan Masalah	A	A	A
2	Usulan Perubahan RI Diterima	A	A	A
3	Interpelasi Resolusi 1747 Bergulir Cepat	A	A	A
4	Iran alihkan Devisa Dollar AS	A	B	B
5	Wapres Berharap Iran Bersedia Berkompromi	A	A	A
6	Lobi Dharmawangsa Tak Bisa Bendung Interpelasi	A	A	A
7	Komisi I DPR Kecewa	A	A	A
8	Golkar Siapkan Tiga Opsi Interpelasi	A	A	A
9	Pengajuan Hak Interpelasi Hanya untuk Minta Penjelasan	A	A	A
10	OKI Memahami Sikap Indonesia soal Iran	A	A	A
11	Kemandirian RI Digugat	A	A	A
Titik kesepakatan			10	10

Ketr: A=Ada
B=Tidak ada

LEMBAR PENILAIAN CODING SHEET
UNIT ANALISIS KELENGKAPAN 5W & 1H
KATEGORI WHERE
DI SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA

NO	JUDUL BERITA	PENELITI	CODER 1	CODER 2
1	DK PBB Jatuhkan Sanksi untuk Iran	A	A	A
2	DPR Galang Interpelasi Nuklir Iran	A	A	A
3	Dukungan Interpelasi Menguat	A	A	A
4	Ulama akan Ajukan <i>Class Action</i>	A	A	A
5	DPR Cengar Menlu Wirajuda	A	A	A
6	PPP akan Teruskan Interpelasi	A	A	A
7	Pemerintah Jawab dengan Tiga Opsi	A	A	A
8	Presiden Diminta Menjelaskan Langsung	A	A	A
9	Penolakan Resolusi Iran di Bogor Rusuh	A	A	A
10	Pemerintah Indonesia Buntut Amerika Serikat	A	A	A
11	Indonesia Tak Bebas Aktif Lagi	A	A	A
12	Interpelasi Iran Tanpa Hasil	A	B	B
Titik kesepakatan			11	11

Ketr: A=Ada
B=Tidak ada

LEMBAR PENILAIAN CODING SHEET
UNIT ANALISIS KELENGKAPAN 5W & 1H
KATEGORI WHEN
DI SURAT KABAR HARIAN KOMPAS

NO	JUDUL BERITA	PENELITI	CODER 1	CODER 2
1	Sanksi Keras Bisa Lahirkan Masalah	A	A	A
2	Usulan Perubahan RI Diterima	A	A	A
3	Interpelasi Resolusi 1747 Bergulir Cepat	A	A	A
4	Iran alihkan Devisa Dollar AS	A	A	A
5	Wapres Berharap Iran Bersedia Berkompromi	A	A	A
6	Lobi Dharmawangsa Tak Bisa Bendung Interpelasi	A	A	A
7	Komisi I DPR Kecewa	A	A	A
8	Golkar Siapkan Tiga Opsi Interpelasi	A	A	A
9	Pengajuan Hak Interpelasi Hanya untuk Minta Penjelasan	A	A	A
10	OKI Memahami Sikap Indonesia soal Iran	A	A	A
11	Kemandirian RI Digugat	A	A	A
Titik kesepakatan			11	11

Ketr: A=Ada
B=Tidak ada

LEMBAR PENILAIAN CODING SHEET
UNIT ANALISIS KELENGKAPAN 5W & 1H
KATEGORI WHEN
DI SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA

NO	JUDUL BERITA	PENELITI	CODER 1	CODER 2
1	DK PBB Jatuhkan Sanksi untuk Iran	A	A	A
2	DPR Galang Interpelasi Nuklir Iran	A	A	A
3	Dukungan Interpelasi Menguat	A	A	A
4	Ulama akan Ajukan <i>Class Action</i>	A	A	A
5	DPR Cengar Menlu Wirajuda	A	A	A
6	PPP akan Teruskan Interpelasi	A	A	A
7	Pemerintah Jawab dengan Tiga Opsi	A	A	A
8	Presiden Diminta Menjelaskan Langsung	A	A	A
9	Penolakan Resolusi Iran di Bogor Rusuh	A	A	A
10	Pemerintah Indonesia Buntut Amerika Serikat	A	A	A
11	Indonesia Tak Bebas Aktif Lagi	A	A	A
12	Interpelasi Iran Tanpa Hasil	A	A	A
Titik kesepakatan			12	12

Ketr: A=Ada
B=Tidak ada

LEMBAR PENILAIAN CODING SHEET
UNIT ANALISIS KELENGKAPAN 5W & 1H
KATEGORI HOW
DI SURAT KABAR HARIAN KOMPAS

NO	JUDUL BERITA	PENELITI	CODER 1	CODER 2
1	Sanksi Keras Bisa Lahirkan Masalah	A	A	A
2	Usulan Perubahan RI Diterima	A	A	A
3	Interpelasi Resolusi 1747 Bergulir Cepat	A	A	A
4	Iran alihkan Devisa Dollar AS	A	A	A
5	Wapres Berharap Iran Bersedia Berkompromi	A	A	A
6	Lobi Dharmawangsa Tak Bisa Bendung Interpelasi	A	A	A
7	Komisi I DPR Kecewa	A	A	A
8	Golkar Siapkan Tiga Opsi Interpelasi	A	A	A
9	Pengajuan Hak Interpelasi Hanya untuk Minta Penjelasan	A	A	A
10	OKI Memahami Sikap Indonesia soal Iran	A	A	A
11	Kemandirian RI Digugat	B	B	B
Titik kesepakatan			11	11

Ketr: A=Ada
B=Tidak ada

LEMBAR PENILAIAN CODING SHEET
UNIT ANALISIS KELENGKAPAN 5W & 1H
KATEGORI HOW
DI SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA

NO	JUDUL BERITA	PENELITI	CODER 1	CODER 2
1	DK PBB Jatuhkan Sanksi untuk Iran	A	A	A
2	DPR Galang Interpelasi Nuklir Iran	A	A	A
3	Dukungan Interpelasi Menguat	B	B	B
4	Ulama akan Ajukan <i>Class Action</i>	A	A	A
5	DPR Cengar Menlu Wirajuda	B	B	A
6	PPP akan Teruskan Interpelasi	A	A	A
7	Pemerintah Jawab dengan Tiga Opsi	A	A	A
8	Presiden Diminta Menjelaskan Langsung	A	A	A
9	Penolakan Resolusi Iran di Bogor Rusuh	A	A	A
10	Pemerintah Indonesia Buntut Amerika Serikat	B	A	B
11	Indonesia Tak Bebas Aktif Lagi	A	A	A
12	Interpelasi Iran Tanpa Hasil	A	A	A
Titik kesepakatan			11	11

Ketr: A=Ada
B=Tidak ada

LEMBAR PENILAIAN CODING SHEET
UNIT ANALISIS NILAI BERITA
DI SURAT KABAR HARIAN KOMPAS

NO	JUDUL BERITA	PENELITI	CODER 1	CODER 2
1	Sanksi Keras Bisa Lahirkan Masalah	A	A	A
2	Usulan Perubahan RI Diterima	A	A	A
3	Interpelasi Resolusi 1747 Bergulir Cepat	A	A	A
4	Iran alihkan Devisa Dollar AS	A	A	A
5	Wapres Berharap Iran Bersedia Berkompromi	A	B	B
6	Lobi Dharmawangsa Tak Bisa Bendung Interpelasi	A	A	A
7	Komisi I DPR Kecewa	A	A	A
8	Golkar Siapkan Tiga Opsi Interpelasi	A	A	A
9	Pengajuan Hak Interpelasi Hanya untuk Minta Penjelasan	A	A	A
10	OKI Memahami Sikap Indonesia soal Iran	A	A	A
11	Kemandirian RI Digugat	A	A	A
Titik kesepakatan			10	10

Ketr: A=Mengarah ke *Significance*
B=Mengarah ke *Human Interest*

LEMBAR PENILAIAN CODING SHEET
UNIT ANALISIS NILAI BERITA
DI SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA

NO	JUDUL BERITA	PENELITI	CODER 1	CODER 2
1	DK PBB Jatuhkan Sanksi untuk Iran	A	A	A
2	DPR Galang Interpelasi Nuklir Iran	A	A	A
3	Dukungan Interpelasi Menguat	A	A	A
4	Ulama akan Ajukan <i>Class Action</i>	A	A	A
5	DPR Cengar Menlu Wirajuda	A	A	A
6	PPP akan Teruskan Interpelasi	A	A	A
7	Pemerintah Jawab dengan Tiga Opsi	A	B	A
8	Presiden Diminta Menjelaskan Langsung	A	A	A
9	Penolakan Resolusi Iran di Bogor Rusuh	A	A	A
10	Pemerintah Indonesia Buntut Amerika Serikat	A	A	A
11	Indonesia Tak Bebas Aktif Lagi	A	A	A
12	Interpelasi Iran Tanpa Hasil	A	A	A
Titik kesepakatan			11	12

Ketr : A=Mengarah ke *Significance*
B=Mengarah ke *Human Interest*

$M_1 = 21$

$M_2 = 22$

LEMBAR PENILAIAN CODING SHEET
UNIT ANALISIS DIMENSI PEMBERITAAN
DI SURAT KABAR HARIAN KOMPAS

NO	JUDUL BERITA	PENELITI	CODER 1	CODER 2
1	Sanksi Keras Bisa Lahirkan Masalah	A	B	B
2	Usulan Perubahan RI Diterima	A	A	A
3	Interpelasi Resolusi 1747 Bergulir Cepat			
4	Iran alihkan Devisa Dollar AS	A	A	A
5	Wapres Berharap Iran Bersedia Berkompromi	A	A	A
6	Lobi Dharmawangsa Tak Bisa Bendung Interpelasi	A	A	A
7	Komisi I DPR Kecewa	A	A	A
8	Golkar Siapkan Tiga Opsi Interpelasi	A	A	A
9	Pengajuan Hak Interpelasi Hanya untuk Minta Penjelasan	A	A	A
10	OKI Memahami Sikap Indonesia soal Iran	B	B	B
11	Kemandirian RI Digugat	A	A	A
Titik kesepakatan			10	10

Ketr : A=Mengarah ke politik dan pemerintah
B=Mengarah ke agama

LEMBAR PENILAIAN CODING SHEET
UNIT ANALISIS DIMENSI PEMBERITAAN
DI SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA

NO	JUDUL BERITA	PENELITI	CODER 1	CODER 2
1	DK PBB Jatuhkan Sanksi untuk Iran	A	A	A
2	DPR Galang Interpelasi Nuklir Iran	A	A	A
3	Dukungan Interpelasi Menguat	A	A	A
4	Ulama akan Ajukan <i>Class Action</i>	B	B	B
5	DPR Cengar Menlu Wirajuda	A	A	A
6	PPP akan Teruskan Interpelasi	A	A	A
7	Pemerintah Jawab dengan Tiga Opsi	A	A	A
8	Presiden Diminta Menjelaskan Langsung	A	A	A
9	Penolakan Resolusi Iran di Bogor Rusuh	A	A	B
10	Pemerintah Indonesia Buntut Amerika Serikat	A	A	A
11	Indonesia Tak Bebas Aktif Lagi	A	A	A
12	Interpelasi Iran Tanpa Hasil	A	A	A
Titik kesepakatan			12	11

Ketr : A=Mengarah ke politik dan pemerintah
B=Mengarah ke agama

$M_1 = 22$

$M_2 = 21$

LEMBAR PENILAIAN CODING SHEET
UNIT ANALISIS TIPE LIPUTAN
DI SURAT KABAR HARIAN KOMPAS

NO	JUDUL BERITA	PENELITI	CODER 1	CODER 2
1	Sanksi Keras Bisa Lahirkan Masalah	B	B	B
2	Usulan Perubahan RI Diterima	B	B	B
3	Interpelasi Resolusi 1747 Bergulir Cepat	A	A	A
4	Iran alihkan Devisa Dollar AS	C	C	C
5	Wapres Berharap Iran Bersedia Berkompromi	B	B	B
6	Lobi Dharmawangsa Tak Bisa Bendung Interpelasi	B	B	B
7	Komisi I DPR Kecewa	C	C	C
8	Golkar Siapkan Tiga Opsi Interpelasi	A	A	B
9	Pengajuan Hak Interpelasi Hanya untuk Minta Penjelasan	A	A	A
10	OKI Memahami Sikap Indonesia soal Iran	A	A	A
11	Kemandirian RI Digugat	B	C	B
Titik kesepakatan			10	10

Ketr : A=Satu Sisi
B=Dua Sisi
C=Multi Sisi

LEMBAR PENILAIAN CODING SHEET
UNIT ANALISIS TIPE LIPUTAN
DI SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA

NO	JUDUL BERITA	PENELITI	CODER 1	CODER 2
1	DK PBB Jatuhkan Sanksi untuk Iran	C	C	B
2	DPR Galang Interpelasi Nuklir Iran	B	B	B
3	Dukungan Interpelasi Menguat	B	B	B
4	Ulama akan Ajukan <i>Class Action</i>	A	A	B
5	DPR Cengar Menlu Wirajuda	B	C	B
6	PPP akan Teruskan Interpelasi	B	C	B
7	Pemerintah Jawab dengan Tiga Opsi	A	A	A
8	Presiden Diminta Menjelaskan Langsung	C	C	C
9	Penolakan Resolusi Iran di Bogor Rusuh	A	A	A
10	Pemerintah Indonesia Buntut Amerika Serikat	A	A	A
11	Indonesia Tak Bebas Aktif Lagi	A	A	A
12	Interpelasi Iran Tanpa Hasil	B	B	B
Titik kesepakatan			10	10

Ketr : A=Satu Sisi
B=Dua Sisi
C=Multi Sisi

$M_1 = 20$

$M_2 = 20$

LEMBAR PENILAIAN CODING SHEET
UNIT ANALISIS TEMA BERITA
DI SURAT KABAR HARIAN KOMPAS

NO	JUDUL BERITA	PENELITI	CODER 1	CODER 2
1	Sanksi Keras Bisa Lahirkan Masalah	A	C	A
2	Usulan Perubahan RI Diterima	C	C	C
3	Interpelasi Resolusi 1747 Bergulir Cepat	A	A	A
4	Iran alihkan Devisa Dollar AS	A	A	A
5	Wapres Berharap Iran Bersedia Berkompromi	C	C	C
6	Lobi Dharmawangsa Tak Bisa Bendung Interpelasi	A	A	A
7	Komisi I DPR Kecewa	C	C	C
8	Golkar Siapkan Tiga Opsi Interpelasi	B	B	C
9	Pengajuan Hak Interpelasi Hanya untuk Minta Penjelasan	A	A	A
10	OKI Memahami Sikap Indonesia soal Iran	B	C	B
11	Kemandirian RI Digugat	C	C	C
Titik kesepakatan			9	10

Ketr : A=Menolak resolusi PBB
 B=Mendukung resolusi PBB
 C=Kombinasi keduanya

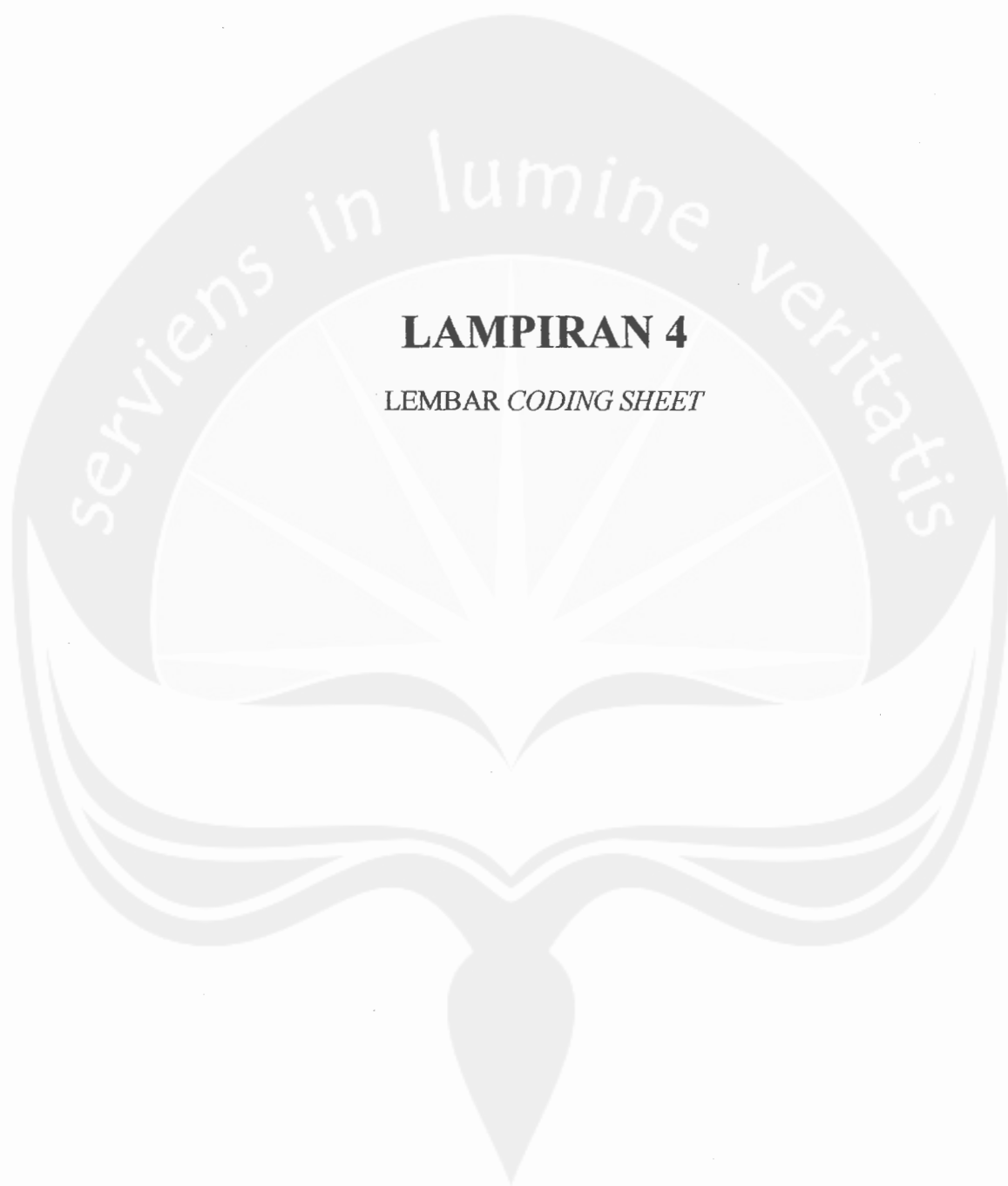
LEMBAR PENILAIAN CODING SHEET
UNIT ANALISIS TEMA BERITA
DI SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA

NO	JUDUL BERITA	PENELITI	CODER 1	CODER 2
1	DK PBB Jatuhkan Sanksi untuk Iran	C	C	C
2	DPR Galang Interpelasi Nuklir Iran	C	C	C
3	Dukungan Interpelasi Menguat	C	C	C
4	Ulama akan Ajukan <i>Class Action</i>	A	A	A
5	DPR Cengar Menlu Wirajuda	C	C	C
6	PPP akan Teruskan Interpelasi	C	C	A
7	Pemerintah Jawab dengan Tiga Opsi	B	B	B
8	Presiden Diminta Menjelaskan Langsung	C	C	A
9	Penolakan Resolusi Iran di Bogor Rusuh	A	A	A
10	Pemerintah Indonesia Buntut Amerika Serikat	A	A	A
11	Indonesia Tak Bebas Aktif Lagi	A	A	A
12	Interpelasi Iran Tanpa Hasil	B	A	C
Titik kesepakatan			11	9

Ketr : A=Menolak resolusi PBB
 B=Mendukung resolusi PBB
 C=Kombinasi keduanya

$M_1 = 20$

$M_2 = 19$



LAMPIRAN 4

LEMBAR CODING SHEET

CODING SHEET

PENELITI

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Sanksi Keras Bisa Lahirkan Masalah
Hari, tanggal terbit : Sabtu, 24 Maret 2007
Nama pengkoding : Flori Bertha Ratna

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ - ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - ☒ b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. Kombinasi keduanya


(FLORI BERTHA R.)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

Flori Bertha Ratna Kusmawati
02170/KOM

CODING SHEET

PENELITI

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Usulan Perubahan RI Diterima
Hari, tanggal terbit : Selasa, 27 Maret 2007
Nama pengkoding : Flori Bertha Ratna

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ - ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - ☒ b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☒ c. Kombinasi keduanya


(FLORI BERTHA R.)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENELITI

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Interpelasi Resolusi 1747 Bergulir Cepat
Hari, tanggal terbit : Rabu, 28 Maret 2007
Nama pengkoding : Flori Bertha Ratna

1. Sifat fakta
 - a. ☒ Fakta sosiologis
 - b. ☐ Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☒ ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - a. ☒ Mengarah ke significance
 - b. ☐ Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - a. ☒ Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. ☐ Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. ☒ Satu sisi
 - b. ☐ Dua sisi
 - c. ☐ Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. ☒ Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. ☐ Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. ☐ Kombinasi keduanya


(FLORI BERTHA R.)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

Flori Bertha Ratna Kusmawati
02170/KOM

CODING SHEET

PENELITI

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Iran alihkan Devisa Dollar AS
Hari, tanggal terbit : Rabu, 28 Maret 2007
Nama pengkoding : Flori Bertha Ratna

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ - ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - ☒ c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. Kombinasi keduanya


(FLORI BERTHA R.)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA


Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENELITI

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Wapres Berharap Iran Bersedia Berkompromi
Hari, tanggal terbit : Kamis, 29 Maret 2007
Nama pengkoding : Flori Bertha Ratna

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ada
 - ☒ - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ - ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - ☒ b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☒ c. Kombinasi keduanya


(FLORI BERTHA R.)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

Flori Bertha Ratna Kusmawati
02170/KOM

CODING SHEET

PENELITI

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Lobi Dharmawangsa Tak Bisa Bendung Interpelasi
Hari, tanggal terbit : Jumat, 30 Maret 2007
Nama pengkoding : Flori Bertha Ratna

1. Sifat fakta

- ☒ a. Fakta sosiologis
- ☐ b. Fakta psikologis

2. Kelengkapan 5W & 1H

a. What

- ☒ ada
- ☐ tidak ada

b. Who

- ☒ ada
- ☐ tidak ada

c. Why

- ☐ ada
- ☒ tidak ada

d. Where

- ☒ ada
- ☐ tidak ada

e. When

- ☒ ada
- ☐ tidak ada

f. How

- ☒ ada
- ☐ tidak ada

3. Nilai berita

- ☒ a. Mengarah ke significance
- ☐ b. Mengarah ke human interest

4. Dimensi pemberitaan

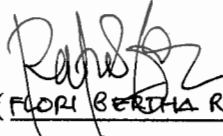
- ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
- ☐ b. Mengarah ke agama

5. Tipe liputan

- ☐ a. Satu sisi
- ☒ b. Dua sisi
- ☐ c. Multi sisi

6. Tema Berita

- ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
- ☐ b. Mendukung resolusi PBB 1747
- ☐ c. Kombinasi keduanya


(FLORI BERTHA R.)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007


Flori Bertha Ratna Kusmawati
02170/KOM

CODING SHEET

PENELITI

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Komisi I DPR Kecewa
Hari, tanggal terbit : Minggu, 1 April 2007
Nama pengkoding : Flori Bertha Ratna

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
☐ ada
- tidak ada
 - b. Who
☐ ada
- tidak ada
 - c. Why
☐ ada
- tidak ada
 - d. Where
☐ ada
- tidak ada
 - e. When
☐ ada
- tidak ada
 - f. How
☐ ada
- tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - ☒ c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☒ c. Kombinasi keduanya


(FLORI BERTHA R.)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

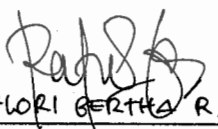
Flori Bertha Ratna Kusmawati
02170/KOM

CODING SHEET

PENELITI

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Golkar Siapkan Tiga Opsi Interpelasi
Hari, tanggal terbit : Senin, 2 April 2007
Nama pengkoding : Flori Bertha Ratna

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ - ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - ☒ a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - ☒ b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. Kombinasi keduanya


(FLORI BERTHA R.)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

Flori Bertha Ratna Kusmawati
02170/KOM

CODING SHEET

PENELITI

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Pengajuan Hak Interpelasi Hanya untuk Minta Penjelasan
Hari, tanggal terbit : Selasa, 3 April 2007
Nama pengoding : Flori Bertha Ratna

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ - ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - ☒ a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. Kombinasi keduanya


(FLORI BERTHA R.)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

Flori Bertha Ratna Kusmawati
02170/KOM

CODING SHEET

PENELITI

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : OKI Memahami Sikap Indonesia soal Iran
Hari, tanggal terbit : Sabtu, 7 April 2007
Nama pengkoding : Flori Bertha Ratna

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ - ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - ☒ b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - ☒ a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - ☒ b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. Kombinasi keduanya


(FLORI BERTHA R.)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

Flori Bertha Ratna Kusmawati
02170/KOM

CODING SHEET

PENELITI

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Kemandirian RI Digugat
Hari, tanggal terbit : Minggu, 8 April 2007
Nama pengkoding : Flori Bertha Ratna

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
☒ - ada
- tidak ada
 - b. Who
☒ - ada
- tidak ada
 - c. Why
☒ - ada
- tidak ada
 - d. Where
☒ - ada
- tidak ada
 - e. When
☒ - ada
- tidak ada
 - f. How
- ada
☒ - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - ☒ b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☒ c. Kombinasi keduanya


(FLORI BERTHA R.)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENELITI

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : DK PBB Jatuhkan Sanksi untuk Iran
Hari, tanggal terbit : Senin, 26 Maret 2007
Nama pengkoding : Flori Bertha Ratna

1. Sifat fakta

- ☒ a. Fakta sosiologis
- b. Fakta psikologis

2. Kelengkapan 5W & 1H

a. What

- ☒ - ada
- tidak ada

b. Who

- ☒ - ada
- tidak ada

c. Why

- ☒ - ada
- tidak ada

d. Where

- ☒ - ada
- tidak ada

e. When

- ☒ - ada
- tidak ada

f. How

- ☒ - ada
- tidak ada

3. Nilai berita

- ☒ a. Mengarah ke significance
- b. Mengarah ke human interest

4. Dimensi pemberitaan


- ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
- b. Mengarah ke agama

5. Tipe liputan

- a. Satu sisi
- b. Dua sisi
- ☒ c. Multi sisi

6. Tema Berita

- a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
- b. Mendukung resolusi PBB 1747
- ☒ c. Kombinasi keduanya


(FLORI BERTHA R.)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

Flori Bertha Ratna Kusmawati
02170/KOM

CODING SHEET

PENELITI

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : DPR Galang Interpelasi Nuklir Iran
Hari, tanggal terbit : Selasa, 27 Maret 2007
Nama pengkoding : Flori Bertha Ratna

1. Sifat fakta

- a. Fakta sosiologis
- ☒ b. Fakta psikologis

2. Kelengkapan 5W & 1H

- a. What
 - ☒ - ada
 - tidak ada
- b. Who
 - ☒ - ada
 - tidak ada
- c. Why
 - ☒ - ada
 - tidak ada
- d. Where
 - ☒ - ada
 - tidak ada
- e. When
 - ☒ - ada
 - tidak ada
- f. How
 - ☒ - ada
 - tidak ada

3. Nilai berita

- ☒ a. Mengarah ke significance
- b. Mengarah ke human interest

4. Dimensi pemberitaan


- ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
- b. Mengarah ke agama

5. Tipe liputan

- a. Satu sisi
- ☒ b. Dua sisi
- c. Multi sisi

6. Tema Berita

- a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
- b. Mendukung resolusi PBB 1747
- ☒ c. Kombinasi keduanya


(FLORI BERTHA R.)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007


Flori Bertha Ratna Kusmawati
02170/KOM

CODING SHEET

PENELITI

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : Dukungan Interpelasi Menguat
Hari, tanggal terbit : Rabu, 28 Maret 2007
Nama pengkoding : Flori Bertha Ratna

1. Sifat fakta
 - ☒ a. Fakta sosiologis
 - ☐ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - e. When
 - ☒ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - f. How
 - ☐ - ada
 - ☒ - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - ☐ b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - ☐ b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - ☐ a. Satu sisi
 - ☒ b. Dua sisi
 - ☐ c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - ☐ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - ☐ b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☒ c. Kombinasi keduanya


(FLORI BERTHA R.)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA


Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENELITI

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : Ulama akan Ajukan *Class Action*
Hari, tanggal terbit : Kamis, 29 Maret 2007
Nama pengkoding : Flori Bertha Ratna

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
☒ - ada
- tidak ada
 - b. Who
☒ - ada
- tidak ada
 - c. Why
☒ - ada
- tidak ada
 - d. Where
☒ - ada
- tidak ada
 - e. When
☒ - ada
- tidak ada
 - f. How
☒ - ada
- tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - ☒ b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - ☒ a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. Kombinasi keduanya


(FLORI BERTHA R.)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA


Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENELITI

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : DPR Cekar Menlu Wirajuda
Hari, tanggal terbit : Jumat, 30 Maret 2007
Nama pengkoding : Flori Bertha Ratna

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
☒ - ada
- tidak ada
 - b. Who
☒ - ada
- tidak ada
 - c. Why
- ada
☒ - tidak ada
 - d. Where
☒ - ada
- tidak ada
 - e. When
☒ - ada
- tidak ada
 - f. How
- ada
☒ - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - ☒ b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☒ c. Kombinasi keduanya


(FLORI BERTHA R.)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENELITI

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : PPP akan Teruskan Interpelasi
Hari, tanggal terbit : Minggu, 1 April 2007
Nama pengkoding : Flori Bertha Ratna

1. Sifat fakta

- a. Fakta sosiologis
- ☒ b. Fakta psikologis

2. Kelengkapan 5W & 1H

a. What

- ☒ - ada
- tidak ada

b. Who

- ☒ - ada
- tidak ada

c. Why

- ☒ - ada
- tidak ada

d. Where

- ☒ - ada
- tidak ada

e. When

- ☒ - ada
- tidak ada

f. How

- ☒ - ada
- tidak ada

3. Nilai berita

- ☒ a. Mengarah ke significance
- b. Mengarah ke human interest

4. Dimensi pemberitaan

- ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
- b. Mengarah ke agama

5. Tipe liputan

- a. Satu sisi
- ☒ b. Dua sisi
- c. Multi sisi

6. Tema Berita

- a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
- b. Mendukung resolusi PBB 1747
- ☒ c. Kombinasi keduanya


(FLORI BERTHA R.)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

Flori Bertha Ratna Kusmawati
02170/KOM

CODING SHEET

PENELITI

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : Pemerintah Jawab dengan Tiga Opsi
Hari, tanggal terbit : Senin, 2 April 2007
Nama pengkoding : Flori Bertha Ratna

1. Sifat fakta
 - a. ☒ Fakta sosiologis
 - b. ☐ Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ ada
 - ☐ tidak ada
 - b. Who
 - ☒ ada
 - ☐ tidak ada
 - c. Why
 - ☐ ada
 - ☒ tidak ada
 - d. Where
 - ☒ ada
 - ☐ tidak ada
 - e. When
 - ☒ ada
 - ☐ tidak ada
 - f. How
 - ☒ ada
 - ☐ tidak ada
3. Nilai berita
 - a. ☒ Mengarah ke significance
 - b. ☐ Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - a. ☒ Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. ☐ Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. ☒ Satu sisi
 - b. ☐ Dua sisi
 - c. ☐ Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. ☐ Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. ☒ Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. ☐ Kombinasi keduanya


(FLORI BERTHA . R)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENELITI

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : Presiden Diminta Menjelaskan Langsung
Hari, tanggal terbit : Selasa, 3 April 2007
Nama pengkoding : Flori Bertha Ratna

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ - ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - ☒ c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☒ c. Kombinasi keduanya


(FLORI BERTHA R.)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

Flori Bertha Ratna Kusmawati
02170/KOM

CODING SHEET

PENELITI

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : Penolakan Resolusi Iran di Bogor Rusuh
Hari, tanggal terbit : Rabu, 4 April 2007
Nama pengkoding : Flori Bertha Ratna

1. Sifat fakta

- ☒ a. Fakta sosiologis
- ☐ b. Fakta psikologis

2. Kelengkapan 5W & 1H

a. What

- ☒ ada
- ☐ tidak ada

b. Who

- ☒ ada
- ☐ tidak ada

c. Why

- ☒ ada
- ☐ tidak ada

d. Where

- ☒ ada
- ☐ tidak ada

e. When

- ☒ ada
- ☐ tidak ada

f. How

- ☒ ada
- ☐ tidak ada

3. Nilai berita

- ☒ a. Mengarah ke significance
- ☐ b. Mengarah ke human interest

4. Dimensi pemberitaan

- ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
- ☐ b. Mengarah ke agama

5. Tipe liputan

- ☒ a. Satu sisi
- ☐ b. Dua sisi
- ☐ c. Multi sisi

6. Tema Berita

- ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
- ☐ b. Mendukung resolusi PBB 1747
- ☐ c. Kombinasi keduanya


(FLORI BERTHA R.)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENELITI

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : Pemerintah Indonesia Buntut Amerika Serikat
Hari, tanggal terbit : Minggu, 8 April 2007
Nama pengkoding : Flori Bertha Ratna

1. Sifat fakta

- a. Fakta sosiologis
- ☒ b. Fakta psikologis

2. Kelengkapan 5W & 1H

a. What

- ☒ ada
- tidak ada

b. Who

- ☒ ada
- tidak ada

c. Why

- ☒ ada
- tidak ada

d. Where

- ☒ ada
- tidak ada

e. When

- ☒ ada
- tidak ada

f. How

- ada
- ☒ tidak ada

3. Nilai berita

- ☒ a. Mengarah ke significance
- b. Mengarah ke human interest

4. Dimensi pemberitaan

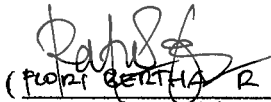
- ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
- b. Mengarah ke agama

5. Tipe liputan

- ☒ a. Satu sisi
- b. Dua sisi
- c. Multi sisi

6. Tema Berita

- ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
- b. Mendukung resolusi PBB 1747
- c. Kombinasi keduanya


(FLORI BERTHA RATNA)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENELITI

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : Indonesia Tak Bebas Aktif Lagi
Hari, tanggal terbit : Sabtu, 26 Mei 2007
Nama pengkoding : Flori Bertha Ratna

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ - ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - ☒ a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. Kombinasi keduanya


(FLORI BERTHA R.)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

Flori Bertha Ratna Kusmawati
02170/KOM

CODING SHEET

PENELITI

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : Interpelasi Iran Tanpa Hasil
Hari, tanggal terbit : Rabu, 11 Juli 2007
Nama pengkoding : Flori Bertha Ratna

1. Sifat fakta

- a. ☒ Fakta sosiologis
- b. ☐ Fakta psikologis

2. Kelengkapan 5W & 1H

a. What

- ☒ ada
- tidak ada

b. Who

- ☒ ada
- tidak ada

c. Why

- ☒ ada
- tidak ada

d. Where

- ☒ ada
- tidak ada

e. When

- ☒ ada
- tidak ada

f. How

- ☒ ada
- tidak ada

3. Nilai berita

- a. ☒ Mengarah ke significance
- b. ☐ Mengarah ke human interest

4. Dimensi pemberitaan


- a. ☒ Mengarah ke politik dan pemerintah
- b. ☐ Mengarah ke agama

5. Tipe liputan

- a. ☐ Satu sisi
- b. ☒ Dua sisi
- c. ☐ Multi sisi

6. Tema Berita

- a. ☐ Menolak resolusi PBB nomor 1747
- b. ☒ Mendukung resolusi PBB 1747
- c. ☐ Kombinasi keduanya


(FLORI BERTHA . R)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

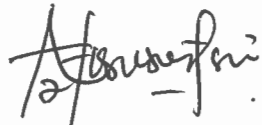
Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING I

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Sanksi Keras Bisa Lahirkan Masalah
Hari, tanggal terbit : Sabtu, 24 Maret 2007
Nama pengkoding : Anastasia Ardyanti Hastari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
☐ - ada
☐ - tidak ada
 - b. Who
☐ - ada
☐ - tidak ada
 - c. Why
☐ - ada
☐ - tidak ada
 - d. Where
☐ - ada
☐ - tidak ada
 - e. When
☐ - ada
☐ - tidak ada
 - f. How
☐ - ada
☐ - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - ☒ b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☒ c. Kombinasi keduanya


(Anastasia Ardyanti.H)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

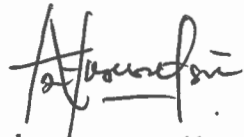
Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING I

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Usulan Perubahan RI Diterima
Hari, tanggal terbit : Selasa, 27 Maret 2007
Nama pengkoding : Anastasia Ardyanti Hastari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
☐ - ada
☐ - tidak ada
 - b. Who
☐ - ada
☐ - tidak ada
 - c. Why
☐ - ada
☐ - tidak ada
 - d. Where
☐ - ada
☐ - tidak ada
 - e. When
☐ - ada
☐ - tidak ada
 - f. How
☐ - ada
☐ - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - ☒ b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☒ c. Kombinasi keduanya


(Anastasia AH)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

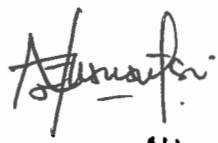
Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING I

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Interpelasi Resolusi 1747 Bergulir Cepat
Hari, tanggal terbit : Rabu, 28 Maret 2007
Nama pengkoding : Anastasia Ardyanti Hastari

1. Sifat fakta
 - a. ☒ Fakta sosiologis
 - b. ☐ Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
☒ ada
- tidak ada
 - b. Who
☒ ada
- tidak ada
 - c. Why
☒ ada
- tidak ada
 - d. Where
☒ ada
- tidak ada
 - e. When
☒ ada
- tidak ada
 - f. How
☒ ada
- tidak ada
3. Nilai berita
 - a. ☒ Mengarah ke significance
 - b. ☐ Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - a. ☒ Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. ☐ Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. ☒ Satu sisi
 - b. ☐ Dua sisi
 - c. ☐ Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. ☒ Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. ☐ Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. ☐ Kombinasi keduanya


(Anastasia AH)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING I

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Iran alihkan Devisa Dollar AS
Hari, tanggal terbit : Rabu, 28 Maret 2007
Nama pengkoding : Anastasia Ardyanti Hastari

1. Sifat fakta

- a. Fakta sosiologis
- ☒ b. Fakta psikologis

2. Kelengkapan 5W & 1H

a. What

- ☒ ada
- tidak ada

b. Who

- ☒ ada
- tidak ada

c. Why

- ☒ ada
- tidak ada

d. Where

- ☒ ada
- tidak ada

e. When

- ☒ ada
- tidak ada

f. How

- ☒ ada
- tidak ada

3. Nilai berita

- ☒ a. Mengarah ke significance
- b. Mengarah ke human interest

4. Dimensi pemberitaan

- ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
- b. Mengarah ke agama

5. Tipe liputan

- a. Satu sisi
- b. Dua sisi
- ☒ c. Multi sisi

6. Tema Berita

- ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
- b. Mendukung resolusi PBB 1747
- c. Kombinasi keduanya


(Anastasia AH)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING I

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Wapres Berharap Iran Bersedia Berkompromi
Hari, tanggal terbit : Kamis, 29 Maret 2007
Nama pengkoding : Anastasia Ardyanti Hastari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☐ - ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☐ - ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☐ - ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ☐ - ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☐ - ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☐ - ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - a. Mengarah ke significance
 - ☒ b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - ☒ c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☒ c. Kombinasi keduanya


(Anastasia a AH)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING I

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Lobi Dharmawangsa Tak Bisa Bendung Interpelasi
Hari, tanggal terbit : Jumat, 30 Maret 2007
Nama pengkoding : Anastasia Ardyanti Hastari

1. Sifat fakta
 - ☒ a. Fakta sosiologis
 - ☐ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What☒ ada
- tidak ada
 - b. Who☒ ada
- tidak ada
 - c. Why☒ ada
- tidak ada
 - d. Where☒ ada
- tidak ada
 - e. When☒ ada
- tidak ada
 - f. How☒ ada
- tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - ☐ b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - ☐ b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - ☐ a. Satu sisi
 - ☒ b. Dua sisi
 - ☐ c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - ☐ b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☐ c. Kombinasi keduanya


(Anastasia AH)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENKODING I

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Komisi I DPR Kecewa
Hari, tanggal terbit : Minggu, 1 April 2007
Nama pengkoding : Anastasia Ardyanti Hastari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
☒ ada
- tidak ada
 - b. Who
☒ ada
- tidak ada
 - c. Why
☒ ada
- tidak ada
 - d. Where
☒ ada
- tidak ada
 - e. When
☒ ada
- tidak ada
 - f. How
☒ ada
- tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - ☒ c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☒ c. Kombinasi keduanya


(Anastasia Alt)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING I

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Golkar Siapkan Tiga Opsi Interpelasi
Hari, tanggal terbit : Senin, 2 April 2007
Nama pengkoding : Anastasia Ardyanti Hastari

1. Sifat fakta

- a. Fakta sosiologis
- ☒ b. Fakta psikologis

2. Kelengkapan 5W & 1H

a. What

- ☒ - ada
- tidak ada

b. Who

- ☒ - ada
- tidak ada

c. Why

- ☒ - ada
- tidak ada

d. Where

- ☒ - ada
- tidak ada

e. When

- ☒ - ada
- tidak ada

f. How

- ☒ - ada
- tidak ada

3. Nilai berita

- ☒ a. Mengarah ke significance
- b. Mengarah ke human interest

4. Dimensi pemberitaan

- ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
- b. Mengarah ke agama

5. Tipe liputan

- ☒ a. Satu sisi
- b. Dua sisi
- c. Multi sisi

6. Tema Berita

- a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
- ☒ b. Mendukung resolusi PBB 1747
- c. Kombinasi keduanya


(Anastasia AH)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING I

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Pengajuan Hak Interpelasi Hanya untuk Minta Penjelasan
Hari, tanggal terbit : Selasa, 3 April 2007
Nama pengkoding : Anastasia Ardyanti Hastari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☒ ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - ☒ a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. Kombinasi keduanya


(Anastasia AH)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING I

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : OKI Memahami Sikap Indonesia soal Iran
Hari, tanggal terbit : Sabtu, 7 April 2007
Nama pengkoding : Anastasia Ardyanti Hastari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ - ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - ☒ a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☒ c. Kombinasi keduanya


(Anastasia AH)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA


Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING I

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Kemandirian RI Digugat
Hari, tanggal terbit : Minggu, 8 April 2007
Nama pengkoding : Anastasia Ardyanti Hastari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ - ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - ☒ c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☒ c. Kombinasi keduanya


(Anastasia AH)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING I

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : DK PBB Jatuhkan Sanksi untuk Iran
Hari, tanggal terbit : Senin, 26 Maret 2007
Nama pengkoding : Anastasia Ardyanti Hastari

1. Sifat fakta
 - ☒ a. Fakta sosiologis
 - b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☐ - ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☐ - ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☐ - ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ☐ - ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☐ - ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☐ - ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - ☒ c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☒ c. Kombinasi keduanya


(Anastasia Att)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

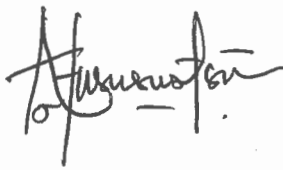
Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING I

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : DPR Galang Interpelasi Nuklir Iran
Hari, tanggal terbit : Selasa, 27 Maret 2007
Nama pengkoding : Anastasia Ardyanti Hastari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☐ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - b. Who
 - ☐ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - c. Why
 - ☐ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - d. Where
 - ☐ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - e. When
 - ☐ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - f. How
 - ☐ - ada
 - ☒ - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - ☒ b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. Kombinasi keduanya


(Anastasia AH)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

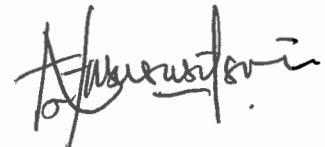
Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING I

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : Dukungan Interpelasi Menguat
Hari, tanggal terbit : Rabu, 28 Maret 2007
Nama pengkoding : Anastasia Ardyanti Hastari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis ☒
 - b. Fakta psikologis ☐
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ada ☒
 - tidak ada ☐
 - b. Who
 - ada ☒
 - tidak ada ☐
 - c. Why
 - ada ☒
 - tidak ada ☐
 - d. Where
 - ada ☒
 - tidak ada ☐
 - e. When
 - ada ☒
 - tidak ada ☐
 - f. How
 - ada ☐
 - tidak ada ☒
3. Nilai berita
 - a. Mengarah ke significance ☒
 - b. Mengarah ke human interest ☐
4. Dimensi pemberitaan
 - a. Mengarah ke politik dan pemerintah ☒
 - b. Mengarah ke agama ☐
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi ☐
 - b. Dua sisi ☒
 - c. Multi sisi ☐
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747 ☐
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747 ☐
 - c. Kombinasi keduanya ☒


(Anastasia AH)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

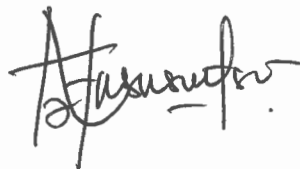
Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING I

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : Ulama akan Ajukan *Class Action*
Hari, tanggal terbit : Kamis, 29 Maret 2007
Nama pengkoding : Anastasia Ardyanti Hastari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ - ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - ☒ b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - ☒ a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. Kombinasi keduanya


(Anastasia AH)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

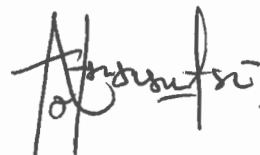
Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING I

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : DPR Cekar Menlu Wirajuda
Hari, tanggal terbit : Jumat, 30 Maret 2007
Nama pengkoding : Anastasia Ardyanti Hastari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ada
 - ☒ - tidak ada
 - e. When
 - ada
 - ☒ - tidak ada
 - f. How
 - ada
 - ☒ - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - ☒ c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☒ c. Kombinasi keduanya



(Anastasia AH)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING I

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : PPP akan Teruskan Interpelasi
Hari, tanggal terbit : Minggu, 1 April 2007
Nama pengkoding : Anastasia Ardyanti Hastari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
☐ - ada
☐ - tidak ada
 - b. Who
☐ - ada
☐ - tidak ada
 - c. Why
☐ - ada
☐ - tidak ada
 - d. Where
☐ - ada
☐ - tidak ada
 - e. When
☐ - ada
☐ - tidak ada
 - f. How
☐ - ada
☐ - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - ☒ c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☒ c. Kombinasi keduanya


(Anastasia AH)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

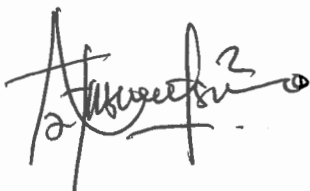
Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENKODING I

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : Pemerintah Jawab dengan Tiga Opsi
Hari, tanggal terbit : Senin, 2 April 2007
Nama pengkoding : Anastasia Ardyanti Hastari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ - ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - a. Mengarah ke significance
 - ☒ b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - ☒ a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - ☒ b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. Kombinasi keduanya


(Anastasia AH)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

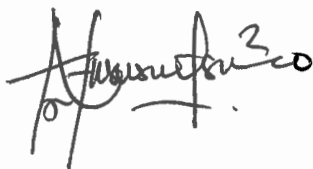
Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING I

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : Presiden Diminta Menjelaskan Langsung
Hari, tanggal terbit : Selasa, 3 April 2007
Nama pengkoding : Anastasia Ardyanti Hastari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ - ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintahan
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - ☒ c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☒ c. Kombinasi keduanya


(Anastasia AH)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING I

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : Penolakan Resolusi Iran di Bogor Rusuh
Hari, tanggal terbit : Rabu, 4 April 2007
Nama pengkoding : Anastasia Ardyanti Hastari

1. Sifat fakta
 - ☒ a. Fakta sosiologis
 - b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☐ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - b. Who
 - ☐ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - c. Why
 - ☐ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - d. Where
 - ☐ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - e. When
 - ☐ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - f. How
 - ☐ - ada
 - ☐ - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - ☒ a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. Kombinasi keduanya



(Anastasia AH)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING I

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : Pemerintah Indonesia Buntut Amerika Serikat
Hari, tanggal terbit : Minggu, 8 April 2007
Nama pengkoding : Anastasia Ardyanti Hastari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What☒ ada
- tidak ada
 - b. Who☒ ada
- tidak ada
 - c. Why☒ ada
- tidak ada
 - d. Where☒ ada
- tidak ada
 - e. When☒ ada
- tidak ada
 - f. How☒ ada
- tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - ☒ a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - ☒ b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. Kombinasi keduanya


(Anastasia AH)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING I

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : Indonesia Tak Bebas Aktif Lagi
Hari, tanggal terbit : Sabtu, 26 Mei 2007
Nama pengkoding : Anastasia Ardyanti Hastari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ - ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintahan
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - ☒ a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. Kombinasi keduanya


(Anastasia AH)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENKODING I

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : Interpelasi Iran Tanpa Hasil
Hari, tanggal terbit : Rabu, 11 Juli 2007
Nama pengkoding : Anastasia Ardyanti Hastari

1. Sifat fakta
 - a. ☒ Fakta sosiologis
 - b. ☐ Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ ada
 - ☐ tidak ada
 - b. Who
 - ☒ ada
 - ☐ tidak ada
 - c. Why
 - ☒ ada
 - ☐ tidak ada
 - d. Where
 - ☒ ada
 - ☐ tidak ada
 - e. When
 - ☒ ada
 - ☐ tidak ada
 - f. How
 - ☒ ada
 - ☐ tidak ada
3. Nilai berita
 - a. ☒ Mengarah ke significance
 - b. ☐ Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - a. ☒ Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. ☐ Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. ☐ Satu sisi
 - b. ☒ Dua sisi
 - c. ☐ Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. ☒ Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. ☐ Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. ☐ Kombinasi keduanya


(Anastasia AH)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

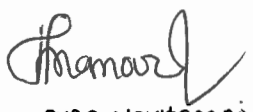
Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING II

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Sanksi Keras Bisa Lahirkan Masalah
Hari, tanggal terbit : Sabtu, 24 Maret 2007
Nama pengkoding : Dyna Novitasari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ - ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - ☒ b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - ☒ b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. Kombinasi keduanya


(Dyna Novitasari)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENKODING II

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Usulan Perubahan RI Diterima
Hari, tanggal terbit : Selasa, 27 Maret 2007
Nama pengkoding : Dyna Novitasari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ - ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - ☒ b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☒ c. Kombinasi keduanya


(Dyna Novitasari)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENKODING II

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Interpelasi Resolusi 1747 Bergulir Cepat
Hari, tanggal terbit : Rabu, 28 Maret 2007
Nama pengkoding : Dyna Novitasari

1. Sifat fakta

- ☒ a. Fakta sosiologis
- ☐ b. Fakta psikologis

2. Kelengkapan 5W & 1H

a. What

- ☒ ada
- ☐ tidak ada

b. Who

- ☒ ada
- ☐ tidak ada

c. Why

- ☒ ada
- ☐ tidak ada

d. Where

- ☒ ada
- ☐ tidak ada

e. When

- ☒ ada
- ☐ tidak ada

f. How

- ☒ ada
- ☐ tidak ada

3. Nilai berita

- ☒ a. Mengarah ke significance
- ☐ b. Mengarah ke human interest

4. Dimensi pemberitaan


- ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
- ☐ b. Mengarah ke agama

5. Tipe liputan

- ☒ a. Satu sisi
- ☐ b. Dua sisi
- ☐ c. Multi sisi

6. Tema Berita

- ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
- ☐ b. Mendukung resolusi PBB 1747
- ☐ c. Kombinasi keduanya


(Dyna Novitasari)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

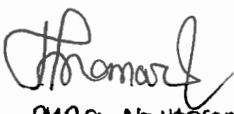
Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING II

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Iran alihkan Devisa Dollar AS
Hari, tanggal terbit : Rabu, 28 Maret 2007
Nama pengkoding : Dyna Novitasari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
☐ - ada
☒ - tidak ada
 - b. Who
☐ - ada
☒ - tidak ada
 - c. Why
☐ - ada
☒ - tidak ada
 - d. Where
☐ - ada
☒ - tidak ada
 - e. When
☐ - ada
☒ - tidak ada
 - f. How
☐ - ada
☒ - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - ☒ c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. Kombinasi keduanya


(Dyna Novitasari)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENKODING II

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Wapres Berharap Iran Bersedia Berkompromi
Hari, tanggal terbit : Kamis, 29 Maret 2007
Nama pengkoding : Dyna Novitasari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
☒ - ada
- tidak ada
 - b. Who
☒ - ada
- tidak ada
 - c. Why
☒ - ada
- tidak ada
 - d. Where
☒ - ada
- tidak ada
 - e. When
☒ - ada
- tidak ada
 - f. How
☒ - ada
- tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - ☒ b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☒ c. Kombinasi keduanya


(Dyna Novitasari)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING II

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Lobi Dharmawangsa Tak Bisa Bendung Interpelasi
Hari, tanggal terbit : Jumat, 30 Maret 2007
Nama pengkoding : Dyna Novitasari

1. Sifat fakta

- ☒ a. Fakta sosiologis
- ☐ b. Fakta psikologis

2. Kelengkapan 5W & 1H

a. What

- ☒ - ada
- ☐ - tidak ada

b. Who

- ☒ - ada
- ☐ - tidak ada

c. Why

- ☐ - ada
- ☒ - tidak ada

d. Where

- ☒ - ada
- ☐ - tidak ada

e. When

- ☒ - ada
- ☐ - tidak ada

f. How

- ☒ - ada
- ☐ - tidak ada

3. Nilai berita

- ☒ a. Mengarah ke significance
- ☐ b. Mengarah ke human interest

4. Dimensi pemberitaan

- ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
- ☐ b. Mengarah ke agama

5. Tipe liputan

- ☐ a. Satu sisi
- ☒ b. Dua sisi
- ☐ c. Multi sisi

6. Tema Berita

- ☐ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
- ☒ b. Mendukung resolusi PBB 1747
- ☐ c. Kombinasi keduanya


(Dyna Novitasari)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA


Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING II

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Komisi I DPR Kecewa
Hari, tanggal terbit : Minggu, 1 April 2007
Nama pengkoding : Dyna Novitasari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
☒ ada
- tidak ada
 - b. Who
☒ ada
- tidak ada
 - c. Why
☒ ada
- tidak ada
 - d. Where
☒ ada
- tidak ada
 - e. When
☒ ada
- tidak ada
 - f. How
☒ ada
- tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - ☒ c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☒ c. Kombinasi keduanya


(Dyna Novitasari)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1747 mengenai Sanksi
atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Pe 1 Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENKODING II

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Golkar Siapkan Tiga Opsi Interpelasi
Hari, tanggal terbit : Senin, 2 April 2007
Nama pengkoding : Dyna Novitasari

1. Sifat fakta
 - ☒ a. Fakta sosiologis
 - ☐ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ ada
 - ☐ tidak ada
 - b. Who
 - ☒ ada
 - ☐ tidak ada
 - c. Why
 - ☒ ada
 - ☐ tidak ada
 - d. Where
 - ☒ ada
 - ☐ tidak ada
 - e. When
 - ☒ ada
 - ☐ tidak ada
 - f. How
 - ☒ ada
 - ☐ tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - ☐ b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - ☐ b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - ☐ a. Satu sisi
 - ☒ b. Dua sisi
 - ☐ c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - ☐ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - ☐ b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☒ c. Kombinasi keduanya


(Dyna Novitasari)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING II

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Pengajuan Hak Interpelasi Hanya untuk Minta Penjelasan
Hari, tanggal terbit : Selasa, 3 April 2007
Nama pengkoding : Dyna Novitasari

1. Sifat fakta

- ☒ a. Fakta sosiologis
- ☐ b. Fakta psikologis

2. Kelengkapan 5W & 1H

a. What

- ☒ - ada
- ☐ - tidak ada

b. Who

- ☒ - ada
- ☐ - tidak ada

c. Why

- ☒ - ada
- ☐ - tidak ada

d. Where

- ☒ - ada
- ☐ - tidak ada

e. When

- ☒ - ada
- ☐ - tidak ada

f. How

- ☒ - ada
- ☐ - tidak ada

3. Nilai berita

- ☒ a. Mengarah ke significance
- ☐ b. Mengarah ke human interest

4. Dimensi pemberitaan

- ☐ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
- ☒ b. Mengarah ke agama

5. Tipe liputan

- ☒ a. Satu sisi
- ☐ b. Dua sisi
- ☐ c. Multi sisi

6. Tema Berita

- ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
- ☐ b. Mendukung resolusi PBB 1747
- ☐ c. Kombinasi keduanya


(Dyna Novitasari)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENKODING II

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : OKI Memahami Sikap Indonesia soal Iran
Hari, tanggal terbit : Sabtu, 7 April 2007
Nama pengkoding : Dyna Novitasari

1. Sifat fakta
 - ☒ a. Fakta sosiologis
 - ☐ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - e. When
 - ☒ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - f. How
 - ☒ - ada
 - ☐ - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - ☐ b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☐ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - ☒ b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - ☒ a. Satu sisi
 - ☐ b. Dua sisi
 - ☐ c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - ☐ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - ☒ b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☐ c. Kombinasi keduanya


(Dyna Novitasari)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING II

Nama surat kabar : KOMPAS
Judul berita : Kemandirian RI Digugat
Hari, tanggal terbit : Minggu, 8 April 2007
Nama pengkoding : Dyna Novitasari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
☒ ada
- tidak ada
 - b. Who
☒ ada
- tidak ada
 - c. Why
☒ ada
- tidak ada
 - d. Where
☒ ada
- tidak ada
 - e. When
☒ ada
- tidak ada
 - f. How
☒ ada
- tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - ☒ b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☒ c. Kombinasi keduanya


(Dyna Novitasari)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING II

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : DK PBB Jatuhkan Sanksi untuk Iran
Hari, tanggal terbit : Senin, 26 Maret 2007
Nama pengkoding : Dyna Novitasari

1. Sifat fakta
 - ☒ a. Fakta sosiologis
 - b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☒ ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - ☒ b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☒ c. Kombinasi keduanya


(Dyna Novitasari)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENKODING II

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : DPR Galang Interpelasi Nuklir Iran
Hari, tanggal terbit : Selasa, 27 Maret 2007
Nama pengkoding : Dyna Novitasari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☐ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - b. Who
 - ☐ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - c. Why
 - ☐ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - d. Where
 - ☐ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - e. When
 - ☐ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - f. How
 - ☐ - ada
 - ☐ - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - ☒ b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☒ c. Kombinasi keduanya


(Dyna Novitasari)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING II

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : Dukungan Interpelasi Menguat
Hari, tanggal terbit : Rabu, 28 Maret 2007
Nama pengkoding : Dyna Novitasari

1. Sifat fakta

- ☒ a. Fakta sosiologis
- ☐ b. Fakta psikologis

2. Kelengkapan 5W & 1H

a. What

- ☒ - ada
- ☐ - tidak ada

b. Who

- ☒ - ada
- ☐ - tidak ada

c. Why

- ☐ - ada
- ☒ - tidak ada

d. Where

- ☒ - ada
- ☐ - tidak ada

e. When

- ☒ - ada
- ☐ - tidak ada

f. How

- ☒ - ada
- ☐ - tidak ada

3. Nilai berita

- ☒ a. Mengarah ke significance
- ☐ b. Mengarah ke human interest

4. Dimensi pemberitaan

- ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
- ☐ b. Mengarah ke agama

5. Tipe liputan

- ☐ a. Satu sisi
- ☒ b. Dua sisi
- ☐ c. Multi sisi

6. Tema Berita

- ☐ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
- ☐ b. Mendukung resolusi PBB 1747
- ☒ c. Kombinasi keduanya


(Dyna Novitasari)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING II

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : Ulama akan Ajukan *Class Action*
Hari, tanggal terbit : Kamis, 29 Maret 2007
Nama pengkoding : Dyna Novitasari

1. Sifat fakta
 - ☒ a. Fakta sosiologis
 - ☐ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
☒ - ada
☐ - tidak ada
 - b. Who
☒ - ada
☐ - tidak ada
 - c. Why
☒ - ada
☐ - tidak ada
 - d. Where
☒ - ada
☐ - tidak ada
 - e. When
☒ - ada
☐ - tidak ada
 - f. How
☒ - ada
☐ - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - ☐ b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☐ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - ☒ b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - ☐ a. Satu sisi
 - ☒ b. Dua sisi
 - ☐ c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - ☐ b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☐ c. Kombinasi keduanya


(Dyna Novitasari)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING II

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : DPR Cekar Menlu Wirajuda
Hari, tanggal terbit : Jumat, 30 Maret 2007
Nama pengkoding : Dyna Novitasari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
☒ - ada
- tidak ada
 - b. Who
☒ - ada
- tidak ada
 - c. Why
- ada
☒ - tidak ada
 - d. Where
☒ - ada
- tidak ada
 - e. When
☒ - ada
- tidak ada
 - f. How
☒ - ada
- tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - ☒ b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. Kombinasi keduanya


(Dyna Novitasari)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA


Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENKODING II

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : PPP akan Teruskan Interpelasi
Hari, tanggal terbit : Minggu, 1 April 2007
Nama pengkoding : Dyna Novitasari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☒ ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - ☒ b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. Kombinasi keduanya


(Dyna Novitasari)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING II

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : Pemerintah Jawab dengan Tiga Opsi
Hari, tanggal terbit : Senin, 2 April 2007
Nama pengkoding : Dyna Novitasari

1. Sifat fakta
 - ☒ a. Fakta sosiologis
 - b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ada
 - ☒ - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ - ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - ☒ a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. Kombinasi keduanya


(Dyna Novitasari)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENKODING II

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : Presiden Diminta Menjelaskan Langsung
Hari, tanggal terbit : Selasa, 3 April 2007
Nama pengkoding : Dyna Novitasari

1. Sifat fakta
 - ☒ a. Fakta sosiologis
 - b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ - ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - ☒ c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. Kombinasi keduanya


(Dyna Novitasari)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA


Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING II

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : Penolakan Resolusi Iran di Bogor Rusuh
Hari, tanggal terbit : Rabu, 4 April 2007
Nama pengkoding : Dyna Novitasari

1. Sifat fakta
 - ☒ a. Fakta sosiologis
 - ☐ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - e. When
 - ☒ - ada
 - ☐ - tidak ada
 - f. How
 - ☒ - ada
 - ☐ - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - ☐ b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☐ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - ☒ b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - ☒ a. Satu sisi
 - ☐ b. Dua sisi
 - ☐ c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - ☐ b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☐ c. Kombinasi keduanya


(Dyna Novitasari)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENKODING II

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : Pemerintah Indonesia Buntut Amerika Serikat
Hari, tanggal terbit : Minggu, 8 April 2007
Nama pengkoding : Dyna Novitasari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ - ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - ☒ a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. Kombinasi keduanya


(Dyna Novitasari)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENKODING II

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : Indonesia Tak Bebas Aktif Lagi
Hari, tanggal terbit : Sabtu, 26 Mei 2007
Nama pengkoding : Dyna Novitasari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ☒ ada
 - tidak ada
 - d. Where
 - ☒ ada
 - tidak ada
 - e. When
 - ☒ ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - ☒ a. Satu sisi
 - b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - ☒ a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - c. Kombinasi keduanya


(Dyna Novitasari)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007

CODING SHEET

PENGKODING II

Nama surat kabar : REPUBLIKA
Judul berita : Interpelasi Iran Tanpa Hasil
Hari, tanggal terbit : Rabu, 11 Juli 2007
Nama pengkoding : Dyna Novitasari

1. Sifat fakta
 - a. Fakta sosiologis
 - ☒ b. Fakta psikologis
2. Kelengkapan 5W & 1H
 - a. What
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - b. Who
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - c. Why
 - ada
 - ☒ - tidak ada
 - d. Where
 - ada
 - ☒ - tidak ada
 - e. When
 - ☒ - ada
 - tidak ada
 - f. How
 - ☒ - ada
 - tidak ada
3. Nilai berita
 - ☒ a. Mengarah ke significance
 - b. Mengarah ke human interest
4. Dimensi pemberitaan
 - ☒ a. Mengarah ke politik dan pemerintah
 - b. Mengarah ke agama
5. Tipe liputan
 - a. Satu sisi
 - ☒ b. Dua sisi
 - c. Multi sisi
6. Tema Berita
 - a. Menolak resolusi PBB nomor 1747
 - b. Mendukung resolusi PBB 1747
 - ☒ c. Kombinasi keduanya


(Dyna Novitasari)

KONTROVERSI SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB KE IRAN DALAM PEMBERITAAN PERS INDONESIA

Analisis Isi Berita Kontroversi Publik Dalam Negeri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai Sanksi atas Iran Ditinjau dari Objektivitas Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode Maret-Juli 2007